



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI VIII DPR RI  
DENGAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**Tahun Sidang** : 2020/2021  
**Masa Persidangan** : I  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Hari, Tanggal** : Kamis, 3 September 2020  
**Pukul** : 10.00-13.56WIB  
**Sifat** : Terbuka  
**Tempat** : Ruang Rapat Pansus B DPR RI  
**Ketua Rapat** : H. Yandri Susanto, S.Pt. (F- PAN)  
**Acara** : Pembahasan RKA K/L TA.2021  
Isu-isu Aktual dan Solusinya.

**Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

**Hadir** 51 dari 52 orang Anggota Komisi VIII DPR RI

**PIMPINAN :**

1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)
2. M. R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., Me.Con (F-PDI Perjuangan)
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Partai Gerindra)
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

**ANGGOTA :**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

6. I Komang Koheri, SE.
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.
8. Selly Andriany Gantina, A.Md.
9. Umar Bashor
10. Ina Ammania
11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
13. H. Rachmat Hidayat, SH.
14. Matindas J. Rumambi, S. Sos.
15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

17. H. John Kenedy Azis, SH.
18. Mohammad Saleh, SE.
19. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
20. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
21. Muhammad Fauzi, SE.
22. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
23. Muhammad Ali Ridha

**FRAKSI PARTAI GERINDRA**

24. Muhammad Rahul
25. H. Jefri Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., MM.
26. Abdul Wachid
27. Drs. H. Zainul Arifin
28. H. Iwan Kurniawan, SH.
29. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

30. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM.Tr.
31. Dra. Delmeria
32. Murhadi, S.Pd.
33. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.
34. Muhammad Rapsel Ali

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

35. H. Maman Imanul Haq
36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
37. H. An'im Falachuddin Mahrus

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

38. Drs. H. Achmad, M.Si.
39. Harmusa Oktaviani, SE.
40. Wastam, SE., SH.
41. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
42. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

43. KH. Bukhori, LC., MA.
44. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
45. Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA.
46. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.
47. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

48. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
49. H. Sungkono
50. M. Ali Taher, SH., M.Hum.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**

51. KH. Muslich Zainal Abidin
52. H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.I.

**Izin  
Undangan**

1 orang Anggota Komisi VIII DPR RI  
Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni  
Monardo beserta jajaran

## **JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):**

**Yang terhormat Bapak Doni Monardo.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.**

**Hadirin yang berbahagia.**

Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan* seluruh alam di mana kita masih bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka Rapat Kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Dan kita patut bersyukur semoga semua yang kita kerjakan ini selalu diberikan kelancaran. Oleh karena itu sebelum kita memulai rapat kerja ini kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing bagian beragama Islam kita membaca *Ummul Kitab Al Fatihah*.

Terima kasih.

**Pak Kepala BNPB yang saya hormati.**

**Para Anggota dan Pimpinan yang saya hormati.**

Bahwa pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sesuai dengan acara rapat-rapat di DPR Masa Persidangan 1, Tahun Sidang 2020/2021 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus dengan fraksi-fraksi tanggal 13 Juli dan Rapat Internal Komisi VIII tanggal 18 Agustus, maka pada hari ini Kamis 3 Desember 2020 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Kepala BNPB dengan tema pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKA K/L Tahun Anggaran 2021 serta isu-isu aktual. Dari laporan sekedar Sekretariat Komisi sekarang sudah hadir secara fisik 12 orang. Ini Pak Doni Kita pindah sementara nih Pak karena di Komisi VIII kemarin ada yang kena Covid. Jadi kita tindakan preventif yang salah satunya kita tidak pakai dulu ruangan disterilkan dulu termasuk semua staf kita minta swab kemarin. Jadi yang hadir juga tetap dibatasi sekarang lebih sedikit secara fisik 12 orang dari 8 fraksi dan virtual itu sebanyak 27 orang.

Oleh karena itu berdasarkan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 Ayat 1 kuorum telah tercapai. Oleh karena itu izinkan kami membuka rapat kerja ini dengan *bismillahirrahmanirrahim* dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA)**

Baik agenda kita pada hari ini yang pertama pengantar dari pimpinan rapat, yang kedua penjelasan dari Kepala BNPB sesuai agenda hari ini, yang ketiga tanya jawab dari anggota termasuk dari meja pimpinan, yang keempat tentu kita akan mengambil sebuah kesimpulan dalam rapat kerja hari ini dan yang kelima penutup. Dari agenda yang saya bacakan tadi bisa kita setujui?

## **(RAPAT: DISETUJUI)**

Kita mulai rapat pukul 10.25 sampai jam 12.00 dulu ya? 12.00 nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu kita perpanjang waktu nanti kita lihat situasi dan kondisinya. Baik Pak Kepala BNPB, Bapak Ibu Anggota dan Pimpinan berdasarkan Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/8459/DPRRI/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang MD3 Pasal 98 Ayat 2 huruf b disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup tugas komisi di bidang anggaran adalah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang maka penyusunan RKA K/L tahun anggaran ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Postur APBN Tahun Anggaran 2001 banyak terkait dengan program penganggaran dan penanggulangan pandemi Covid-19 yang akan dilakukan paling lama sampai terakhir Tahun Anggaran 2022.

Oleh karena itu pembahasan rencana kerja dan anggaran BNPB Tahun Anggaran 2021 ini menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran. Selain itu kedudukan Kepala BNPB sebagai Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan dalam struktur komite kebijakan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2000 juga menjadi sangat strategis karena berada dan langsung dengan penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia.

### **Kepala BNPB hormati Bapak Ibu Anggota DPR yang terhormat.**

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan RKA KL BNPB tahun 2021 pada tanggal 23 Juni 2020 -jadi waktu kita membahas pagu indikatif Pak Doni- BNPB telah menyampaikan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp.715.431.113.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebesar Rp. 238.719.462.000.
- b. Program ketahanan bencana sebesar Rp.476.771.651.000.

Selanjutnya Kepala BNPB juga menyampaikan usulan penambahan anggaran BNPB tahun 2001 sebesar Rp.51.238.881.000 dengan rincian usaha tambahan itu yang pertama:

- a. Program dukungan manajemen sebesar Rp.2. 259.870.000.
- b. Program ketahanan bencana sebesar Rp.48.979.011.000.

Terhadap pagu indikatif BNPB tahun 2021 tersebut Komisi VIII DPR RI telah menerima dan memberikan persetujuan waktu itu Pak Doni. Tinggal sekarang tergantung pada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. Namun demikian terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran Komisi VIII DPR RI meminta BNPB untuk bersungguh-sungguh menyiapkan rencana kerja dan anggaran bagi penanganan Covid-19 khususnya dalam menyelamatkan masyarakat yang berdampak Covid-19, rencana kerja dan anggaran BNPB harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di bidang kebencanaan. Dengan demikian rencana kerja dan anggaran BNPB dapat mencerminkan upaya mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana Covid-19.

Dalam konteks tersebut pada rapat kerja hari ini Komisi VIII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan BNPB mengenai pertama, apa sajakah rencana kerja dari anggaran BNPB tahun 2021 dan apa prioritasnya? Mungkin juga bisa disendirikan dengan Komisi VIII Pak Doni yang bisa kita teman-teman di Dapil bagaimana yang bisa kita sadari disendirikan walaupun itu *costnya* tetap dari BNPB sehingga pengawasan berjalan tapi kita juga bisa ada menyapa masyarakat di Dapil-nya masing-masing. Dan selama ini tentu saya juga terima kasih Pak Doni beserta seluruh jajaran. Pak Ermen yang sudah banyak memberikan kerja sama kepada Komisi VIII. Kami paham betul bagaimana tiupan Pak Doni tapi masih bisa kerja sama. Harapan kita kerja sama itu tetap kita jaga dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang.

Yang kedua bagaimana target yang hendak dicapai BNPB pada tahun 2021 dan apa parameternya? Yang ketiga apakah dalam mewujudkan tahun 2021 ada program atau insentif baru atau ada program baru yang bersifat multi years? Nah ini digambarkan saja nanti Pak, walaupun kami tidak perlu tahu sampai satuan tiga Pak. Tapi gambaran besarnya kami ketika ditanya masyarakat juga bisa menjawab.

Saya kira itu Pak Doni intinya kami dari Komisi VIII karena sekarang ini belum berakhir BNPB tetap menjadi tulang punggung untuk percepatan penanggulangan. Ya kita berdoa Pak Bapak Ibu semoga lebih cepat berlalu dan kita bisa hidup normal kembali dan bisa melakukan hal-hal besar untuk bangsa dan negara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Doni kami doakan sehat terus Pak dan terus berjuang untuk bangsa dan negara. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Letnan Jenderal Doni Monardo untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan.

**KEPALA BNPB (LETJEN DONI MONARDO):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Shalom. Om Swastiastu. Namu buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.

**Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan beserta segenap Anggota Komisi VIII DPR RI termasuk juga para Anggota Komisi VIII DPR RI yang sekarang acara secara virtual.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk akan rapat kerja dengan Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati.**

Rapat kerja ini diselenggarakan sesuai dengan undangan dari wakil ketua DPR RI Korkesra Nomor AG/987/DPRRI/VII.2020 tanggal 8 Agustus 2020 perihal undangan rapat mengenai pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2021 serta isu-is aktual dan solusinya.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati.**

Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor S-692/MK.02/2020 dan B.636/M.PPM/D/8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Pagu Anggaran Kementerian lembaga dan dasar rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2021 yang menyebutkan Pagu Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 sebesar Rp.813.103.749.000. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif sebelumnya sebesar Rp.715.431.113.000.

Pagu Anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dirumuskan ke dalam program sebagai berikut:

1. Program ketahanan bencana. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.562.712.672.000 di mana di dalamnya sudah termasuk anggaran dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar 250 miliar rupiah.
2. Program dukungan manajemen. Untuk program ini di alokasikan anggaran sebesar Rp.250.391.077.000.

Adapun per jenis belanja dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp.74.131.939.000.
2. Belanja barang dengan pagu sebesar Rp.484.628.710.000.
3. Belanja modal dengan pagu sebesar Rp.4.343.100.000.
4. Belanja bantuan sosial dengan pagu sebesar Rp.250.000.000.000.

### **Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami muliakan.**

BNPB dan BMKG telah memenuhi persyaratan Bank Dunia untuk mendapatkan pendanaan kegiatan Indonesia *Disaster Response Initiative Project* atau IDRIP yang mana negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia telah dilaksanakan pada 5 November 2019. Bank Dunia telah memberikan persetujuan untuk pendanaan dengan jumlah pinjaman sebesar 160 juta US Dollar atau setara dengan 2,288 triliun dengan rencana implementasi tahun 2021/2024. BNPB akan melaksanakan program kesiapsiagaan bencana tingkat kota, desa, dan keluarga serta meningkatkan Pusdalop di kabupaten kota. Sedangkan BMKG mengadakan peralatan *early warning system*. Dalam Pagu Anggaran BB tahun 2021 telah tercatat pinjaman luar negeri sebesar 81 miliar.

### **Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami muliakan.**

Selanjutnya kami laporkan Pagu Anggaran BNPB pada tahun 2020 adalah sebesar RP. 8.050.229.984.000. Dari total anggaran tahun 2020 tersebut hingga awal bulan September 2020 ini telah terserap sebesar Rp.4.075.222.430.000 atau sebesar 50,62%. Dengan demikian realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan pagu sebesar Rp.212.433.214.000. sedangkan realisasi sebesar Rp.123.135.398.294.000 atau 57,96%.
2. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dengan pagu sebesar Rp.8.924.900.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.849.122.400 atau 31,92%.
3. Program penanggulangan bencana dengan pagu Rp.7.828.871.870.000 dengan realisasi sebesar Rp.3.949.237.909.801. atau 50,44%.

Kami laporkan juga perkembangan penyaluran dana siap pakai untuk penanganan darurat tahun 2020 dari anggaran sebesar 7,6 triliun telah disalurkan anggaran dana siap pakai sebesar 3,8 triliun dan masih dalam proses penyelesaian dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan. Dana siap pakai antara lain diberikan kepada:

1. Markas Besar TNI sebesar Rp. 133.705.320.517 untuk operasional penanganan bencana non alam Covid-19 di Natuna, Wisma Atlet, Pulau Sebaru dan Pulau Galang. Sebagaimana yang Bapak Pimpinan ketahui sejak awal kepulangan WNI kita dari Wuhan, Tiongkok dan sejumlah kapal pesiar baik dari Jepang dan beberapa negara lainnya.
2. BNPB sebesar 716,1 Miliar untuk pemulangan pengungsi WNI paska observasi di Natuna, dan pemulangan WNI ke daerah asal, operasional penanganan darurat Covid-19, pengadaan reagen PCR,

bantuan logistik, dan peralatan operasional rumah sakit darurat Wisma Atlet.

3. Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan sebesar 1,4 triliun untuk belanja APD.
4. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebesar 189,1 Miliar untuk bantuan alat kesehatan di tempat fasilitas penampungan karantina, observasi di Pulau Galang dan pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan.
5. Direktorat Surveilans dan Karantina Kementerian Kesehatan sebesar 15 Miliar untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19.
6. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan sebesar 975,6 Miliar untuk operasional pelayanan kesehatan di Pulau Sebaru dan pelayanan kesehatan untuk 15.956 pasien.
7. Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan sebesar 83 Miliar untuk penyediaan bahan pangan tambahan bagi para tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19.
8. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sebesar 4,093 Miliar untuk dukungan pemeriksaan Covid-19.
9. Gugus tugas Provinsi Jawa Timur sebesar 42,8 Miliar untuk operasional Rumah Sakit Terangan.
10. Universitas Airlangga sebesar 10,9 Miliar untuk sarana prasarana Kemendikbud dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 .
11. Pusdokes Polri sebesar 20 Miliar untuk penanganan darurat Covid-19.
12. Penanganan bencana alam sebesar 238,046 miliar.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia tahun 2045 yaitu Indonesia maju. Untuk itu penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden telah menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan SDM.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Penyederhanaan regulasi.



4. Penyerderhanaan birokrasi.
5. Trransportasi ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJMN 2005-2025 visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024 yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan. 7 agenda pembangunan RPJMN 2025 sampai 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transportasi pelayanan publik.

Dalam 7 agenda pembangunan tersebut terintegrasi komponen-komponen pengurangan risiko bencana. Pada agenda kedua tentang pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan tersimpan misi untuk pengurangan risiko bencana dan penguatan kapasitas ketahanan bencana sesuai karakteristik masing-masing daerah. Dalam tujuan pembangunan ketiga target peningkatan sumber daya manusia terintegrasi upaya perlindungan sosial individu terhadap proses keterpaparan bencana dan perubahan iklim.

Penguatan infrastruktur sebagaimana tercantum dalam target pembangunan kelima sudah mengakomodasi analisis resiko bencana sehingga ke depan kita mengharapkan infrastruktur yang tangguh bencana. Pada agenda pembangunan yang keenam dia itu pembangunan lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bagi lingkungan hidup.
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

3. Pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas yaitu meliputi bidang energi lahan limbah, industri, dan kelautan.

#### **4. Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

##### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Selanjutnya dapat kami sampaikan secara umum tren bencana semakin meningkat sampai awal bulan September 2021. Tercatat 1.934 kejadian bencana. Bencana hidrometeorologi mendominasi antara lain banjir menempati urutan pertama diikuti puting beliung dan tanah longsor. Bencana juga menimbulkan penduduk yang terdampak dan mengungsi mencapai angka 3,8 juta jiwa merenggut 272 jiwa meninggal dunia, serta 422 jiwa luka-luka.

Adapun mengenai *update* penanganan Covid-19 dapat kami sampaikan secara singkat bahwa saat ini satuan tugas penanganan Covid-19 sudah memiliki rencana kerja yang membawahi 5 bidang:

1. Yang pertama yaitu bidang data dan teknologi informasi.
2. Bidang komunikasi publik.
3. Bidang perubahan perilaku.
4. Bidang penanganan kesehatan dan relawan.

Target besar satuan tugas.

##### **F- PKS (K.H. BUKHORI, L.C., M.A):**

Interupsi Pimpinan. Sebentar ini yang dibaca bahannya yang mana? Daritadi saya coba-coba.

##### **KETUA RAPAT:**

Ada Pak disini Pak.

##### **F- PKS (K.H. BUKHORI, L.C., M.A):**

Ada tetapi sangat singkat sekali sampaikan bahwa ketua BNPB cukup detail banyak data-data yang penting ... terima kasih. Mohon disinkronkan datanya Pak.

##### **KETUA RAPAT:**

Lanjut Pak Doni.

##### **KEPALA BNPB (LETJEN DONI MONARDO):**

Terima kasih Pak. Mungkin ada yang keliru dalam pembagian ya? Nanti kita perbaiki fotokopinya Pak. Tolong Pak.

Target besar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 adalah 8 yaitu melindungi kelompok rentan. Mohon ditayangkan. Yang pertama adalah melindungi kelompok rentan. Bapak Pimpinan pada awal Gugus Tugas ini kami lebih cenderung penugasan kepada pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk kesehatan seperti APD kemudian ventilator bersama dengan Kementerian Kesehatan lantas pemenuhan reagen PCR, mesin dan juga berbagai macam kelengkapan untuk rumah sakit. Namun setelah kami melihat perkembangan perlu ada strategi baru dalam penanganan Covid ini Bapak Pimpinan. Kenapa demikian? Karena setelah kita juga memperhatikan sejumlah negara dengan sistem kesehatan yang jauh lebih baik namun korban jiwa juga berjatuh seperti di Amerika korban jiwanya juga telah mencapai sangat besar dan korban-korban yang terpapar Covid juga sangat tinggi.

Termasuk di negara kita Bapak Pimpinan korban jiwa telah mendekati angka 7.800 orang dan lebih dari 100 orang dokter kita telah wafat. Dan tadi malam kami memfasilitasi doa bersama dengan seluruh organisasi kedokteran dan juga dengan pimpinan tokoh-tokoh agama lintas agama termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga ke depan strategi kita tidak boleh lagi hanya berpaku kepada masalah penanganan kesehatan. Kita harus bergerak di hulunya yaitu dalam program perubahan perilaku. Apabila ini bisa kita lakukan dengan baik *Insy Allah* masyarakat akan semakin patuh dan risiko yang terpapar tentunya bisa semakin kecil sehingga beban rumah sakit tidak terlalu berat dan akan memberikan ruang kepada dokter untuk adanya relaksasi sehingga dokter tidak perlahan-lahan tidak kehabisan tenaga dan waktu serta kita dapat melindungi dokter dengan cara yang lebih baik lagi.

Inilah yang menjadi program kami ke depan yaitu yang pertama perlindungan terhadap kelompok rentan. Di sini lebih kepada upaya preventif termasuk juga tenaga kesehatan tadi kami laporkan dengan menggunakan dana siap pakai pada beberapa minggu yang lalu telah disalurkan sekitar 83 Miliar untuk pemenuhan vitamin dan gizi kepada para dokter terutama dokter-dokter yang berada di rumah sakit.

**KETUA RAPAT:**

Maaf Pak, 83?

**KEPALA BNPB (LETJEN DONI MONARDO):**

Miliar itu tahap pertama Pimpinan dalam poin, halaman 19. Jadi itu segera kami bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dengan bapak menteri sehingga dokter bisa mendapatkan asupan gizi tambahan.

Kemudian yang kedua adalah menekan kasus baik kasus konfirmasi positif, mengurangi angka kematian, dan juga meningkatkan angka kesembuhan. Kemudian target yang ketiga. Target yang ketiga adalah peningkatan *testing, tracing* dan *treatment*. Untuk *testing* Bapak Pimpinan,

bapak presiden memerintahkan agar berada pada kemampuan sekitar 30 ribu *testing*. Walaupun beberapa kali itu mampu lebih dari 30.000 testing per hari. Tetapi itu adalah jumlah spesimen belum mencapai jumlah orang yang dapat merata di seluruh provinsi karena angka kemampuan testing yang baru memenuhi standar WHO baru 4 provinsi yaitu DKI, Sumatera Barat Kalimantan Selatan, dan Yogyakarta. Sementara provinsi lain masih belum. Walaupun kami sudah berusaha untuk menyalurkan bersama dengan Kementerian Kesehatan mesin PCR tetapi ternyata Bapak Pimpinan tidak mudah untuk dapat melakukan pemeriksaan spesimen karena ternyata juga banyak petugas laboratorium yang akhirnya terpapar Covid sehingga lebih lab ditutup. Ini masih membutuhkan berbagai macam langkah termasuk upaya-upaya untuk mencari teknologi yang lebih aman bagi petugas laboratorium kita.

Kemudian juga upaya untuk meningkatkan vaksinasi. Program vaksinasi yang sudah dijelaskan oleh pemerintah melalui Kementerian PPN selaku menteri selaku ketua pelaksana dalam beberapa bulan yang akan datang untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Kemudian pengadaan reagen PCR dan juga APD yang tadi sudah kami laporkan anggarannya disalurkan ke Kementerian Kesehatan. Namun untuk periode yang akan datang Kementerian Keuangan bersama dengan BNPB dan Kementerian Kesehatan akan membuat sebuah perubahan karena anggarannya di BNPB kemungkinan nanti untuk pengadaan APD diselenggarakan oleh BNPB.

Kemudian yang berikutnya sosialisasi masif upaya kita untuk mengajak masyarakat agar bisa patuh dengan menggunakan semua jalur media yang ada. Kemudian program perubahan perilaku sendiri Bapak Pimpinan kami akan mengikutsertakan kementerian-kementerian yang memang sudah memiliki jaringan infrastruktur dan SDM sampai ke tingkat yang paling rendah baik di kabupaten/kota sampai ke tingkat desa. Untuk sub bidang edukasi kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar seluruh pelajar baik di tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi bisa mendapatkan pembekalan tentang Covid. Dan Sub bidang edukasi ini akan dipimpin oleh salah satu Dirjen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga seluruh sekolah baik swasta negeri maupun pesantren bisa mendapatkan program-program yang berhubungan dengan penanganan Covid.

Kemudian sub bidang sosialisasi kami meminta dukungan dan bantuan dari BKKBN. BKKBN pernah menjadi salah satu lembaga yang sukses saat program KB dan infrastruktur BKKBN ini sudah sangat kuat Bapak Pimpinan. Dari penjelasan tim BKKBN mereka memiliki seluruh unsur pendukung sekitar 100 ulangi 1.500.000 orang dan ini melibatkan Posyandu termasuk juga pelibatan Sejumlah organisasi ada di tingkat desa yaitu karang taruna juga PKK. Bapak presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk memberdayakan PKK seoptimal mungkin.

Kemudian bidang perubahan perilaku sendiri kami harapkan ke depan itu bisa menjangkau seluruh kelompok masyarakat mulai dari individu kemudian keluarga kemudian komunitas kemudian kewilayahan daratan juga instansi. Sehingga diharapkan tidak ada yang luput dalam program perubahan perilaku. Demikian juga ada tagline yang sekarang sedang dilakukan yaitu "Ayo Pakai Masker". Dan ini akan berlangsung terus untuk beberapa waktu ke depan kampanye yang "Ayo Pakai Masker" selalu kita optimalkan. Presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri agar meminta seluruh gubernur, bupati, walikota untuk bisa menyiapkan masker kepada masyarakat. Tetapi penggunaan masker ini pun kita ingat kan harus sesuai dengan kondisi yang ada mereka yang berada di area publik sebaiknya menggunakan masker yang memiliki standar kesehatan yang tepat. Karena masker dengan kualitas yang kurang bagus ini juga bisa membahayakan penggunanya.

Kemudian tahapan-tahapan berikutnya adalah secara paralel nanti ajakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Menjaga jarak ini adalah kalimat yang gampang sekali diucapkan tetapi sangat sangat sulit dilakukan. Apalagi menghindari kerumunan dan kami telah mencoba mengingatkan seluruh Satgas daerah untuk mengambil kebijakan yang tepat sehingga dapat membantu mengurangi kelompok masyarakat untuk berkumpul termasuk juga di perkantoran yang sudah kami sampaikan lewat surat edaran maksimal 50%. Termasuk juga kluster-kluster yang sekarang ini sedang berkembang di tengah masyarakat yaitu daftar perkantoran dan juga kluster dari transportasi umum.

Kemudian yang terakhir tentang perubahan perilaku ini adalah mitigasi. Kami melibatkan pakar di bidang sosiologi, antropologi, dan para psikolog yang kiranya daerah-daerah tertentu yang masih adanya ketidakpercayaan tentang topik yang masih menganggap Covid adalah rekayasa, yang masih menganggap Covid ini adalah konspirasi. Kami akan upayakan untuk tim gabungan seperti ini bisa menjangkau ke daerah-daerah tersebut. Data yang sempat kami kumpulkan Bapak Pimpinan ini data beberapa bulan yang lalu terhadap lima provinsi adalah masih adanya masyarakat yang menganggap dirinya itu tidak mungkin kenapa kena Covid yang tertinggi ternyata adalah di DKI Jakarta, yang kedua adalah di Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat hari ini angka kasus di Jakarta dan Jawa Timur masih tinggi mungkin data yang dikumpulkan tentunya mungkin sudah lumayan akurat. Berikutnya di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat serta di Kalimantan Selatan.

Kemudian juga kami mencoba untuk mengumpulkan data dari pasien yang dirawat di Rumah Sakit Atlet. Dari 944 pasien yang dirawat ternyata komposisi mereka yang terpapar Covid ini sebagian besar sekitar 62% adalah ia menggunakan transportasi umum. Dan kami sudah mengingatkan kepada Kementerian PAN RB dan juga Kementerian BUMN untuk membatasi bahkan harus mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik. Kemudian kami juga sudah berbicara kepada Pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi tentang penggunaan transportasi ganjil dan genap. Hari

Minggu malam yang lalu kami melakukan video *conference* dengan sejumlah pejabat dari Pemerintah DKI dan kementerian/lembaga didapatkan data bahwa setelah adanya kebijakan ganjil genap untuk DKI terdapat peningkatan untuk transportasi kereta api sebesar 3,5% dari rata-rata sekitar 400.000 penumpang per hari. Angka 3,5% kelihatannya adalah sedikit tetapi karena jumlah penumpang yang ada di kereta api ini cukup besar maka penambahan 3,5% ini akhirnya meningkatkan kepadatan di dalam gerbong. Demikian juga transportasi Transjakarta ada peningkatan sebesar 6 sampai 12%. Nah ini yang menjadi permintaan kami kepada Pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi sehingga upaya kita untuk mengurangi kerumunan ini bisa terlaksana.

Kemudian tentang yang terakhir *interoperabilitas* data kami semua berusaha untuk semaksimal mungkin bisa terintegrasi sehingga data-data ini bisa menjadi dashboard bagi seluruh daerah. Dan data ini harus digunakan oleh seluruh kepala daerah, para komandan Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Mana daerah yang masih merah tentunya harus meningkatkan kewaspadaan. Bapak presiden mengingatkan tentang gas dan rem. Jadi kalau seandainya zonanya merah kasus yang meningkat maka remlah yang ditekan. Ketika daerah sudah berkurang kasusnya maka gas bisa ditambah. Dan setiap daerah memang harus selalu memperhatikan perkembangan terjadi. Termasuk juga perkembangan harian keberadaan rumah sakit dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan. Sehingga setiap pimpinan di daerah harus betul-betul mewaspadaai agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang keteersedianya rumah sakit.

Untuk DKI Jakarta sendiri kami telah bekerjasama dengan Puskes TNI yang mengelola Rumah Sakit Atlet agar bisa menampung pasien-pasien yang ada di rumah sakit rujukan sehingga beban rumah sakit rujukan Covid di Jakarta bisa berkurang. Termasuk juga masyarakat yang statusnya OTG tetapi tidak ada gejala, namun karena rumahnya mereka itu mungkin tidak tepat untuk isolasi mandiri maka ke Rumah Sakit Atlet semaksimal mungkin untuk bisa menampung masyarakat untuk isolasi Mandiri yang disiapkan oleh Wisma Atlet.

Dalam beberapa minggu terakhir ini Bapak Pimpinan terjadi peningkatan yang semula daerah zona merah 32, sekarang bertambah menjadi 65. Demikian juga yang *orange* sedangkan zona kuning dan zona hijau mengalami penurunan. Dibutuhkan kerja keras dari seluruh komponen masyarakat di seluruh daerah yang perubahan statusnya menuju ke jarak yang ditempuhnya sedang dan tinggi untuk bisa lebih bekerja keras dengan meningkatkan kerja sama dan melibatkan seluruh instrumen yang ada sampai tingkat RT/RW.

**Bapak Pimpinan yang kami muliakan beserta dengan seluruh Anggota Komisi VIII sekalian.**

Demikianlah penjelasan yang dapat kami laporkan mengenai RKA K/L BNPB Tahun Anggaran 2021 serta isu-isu aktual lainnya. Apabila ada hal yang perlu pengalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Om santi santi santi om. Namu buddhaya. Salam kebajikan.*

**KETUA RAPAT:**

Ya terima kasih Pak Kepala BNPB Bapak Doni Monardo atas paparannya. Tadi saya setuju Pak pakai masker standar itu tapi faktanya masyarakat susah bakal yang kalangan bawah dan mereka tidak perlu peduli itu yang menjadi masalah sekarang untuk pakai masker yang standar itu Pak Doni karena mereka untuk beli masker saja katanya susah Pak. Atau memang mereka enggak tergerak. Atau memang ini kampanyenya memang mesti masif dan harus sampai ke sanubari mereka kalau enggak susah.

Nah kemudian tadi baru empat daerah yang memenuhi standar. Ya Allah, sementara kita dengar itu Bandung dan Surabaya dengan sangat tinggi Pak .... nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Termasuk mungkin dengan adanya penambahan tes di masyarakat. *Testing* masyarakat itu sehari 30.000 yang membuat data kita melonjak ya Pak Ermen? Artinya sebenarnya yang bergentayangan banyak Pak. Mungkin kita sesama anggota Komisi VIII harus hati-hati Pak. Karena enggak tahu ini samping kiri kanan kita apa sudah *swab* atau bagaimana mereka ketemu sama siapa ini. Kata Pak Doni tadi ini jangan dianggap remeh bukan halusinasi, bukan sebuah konspirasi. Ini fakta, faktanya ada jangan dianggap remeh.

**Baik Bapak Ibu Anggota yang terhormat.**

sekarang saya berikan kepada masing-masing fraksi untuk merespon agenda kita hari ini yaitu RKA K/L tahun 2021 dan isu-isu aktual. Jadi intinya pagu indikatif sudah kita setuju. Ini tadi paparan agak rinci walaupun belum terlalu rinci nanti akan ada rapat RDP dengan para Deputi. Kami persilakan mulai dari siapa yang duluan *nih?* dari Gerindra silakan Pak Jefry Romdoni.

**F- PARTAI GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):**

*Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.  
Dan juga yang terhormat Pak Doni beserta jajarannya.**

Saya ucapkan selamat pertama-tama ke para Bapak bahwasanya menurunnya kasus Covid di bawah rata-rata global dan juga kesembuhan

juga terus mengalami peningkatan di atas rata-rata global. Capaian ini tentunya harus ditingkatkan agar ke depannya memang Covid ini memang bisa diselesaikan walaupun Pak Doni bilang entah sampai kapan.

Kemudian dari paparan yang sudah disampaikan tadi ada beberapa yang cukup menarik pertama ini disampaikan dari bahan yang disampaikan depannya ada namanya Desa Tangguh Bencana ya itu lanjutnya itu bagaimana? Apakah itu memang merata di setiap desa atau memang tanya tertentu saja? Karena Ya setidaknya ini memang sangat penting untuk melihat ini supaya memang masyarakat tanggap akan bencana. Oleh karena itu juga BNPB saya harap memperhatikan juga usulan anggota DPR tentang pembentukan desa tangguh yang berasal dari daerah pemilihannya.

Kemudian selain tingkat kematian yang masih di atas 4% hal lain yang membuat saya penasaran ini adalah positif *rate* yang tiap bulannya merangkak naik. Bahkan pada Agustus ini mencapai 15% padahal di Juni itu hanya 11%. Mohon dijelaskan apa penyebabnya meningkatnya positif *rate* ini dan langkah strategis untuk menekan ini apa yang dilakukan?

Kemudian tadi juga disampaikan mengenai gerakan memakai masker. Menurut hemat saya ini memang hal yang signifikan karena dampaknya dalam mencegah penularan Covid-19 murah dan praktis. Jadi ya tentunya bisa dipakai ulang. Nah gerakan ini juga bisa dilihat dari ukuran nyata adaptasi kebiasaan baru. Menurut hemat saya bahwasanya seseorang setiap orang terutama yang bekerja di luar rumah ini memiliki 3 atau 5 masker kain sehingga bisa berganti setiap hari. Dukungan dari Satgas dan BNPB terkait pembagian masker kepada masyarakat menjadi hal yang harus dilakukan. Saya mau melihat Jenderal Doni andai-andai tetapi ilmiah terkait dengan Covid-19 dalam hal ini adalah vaksin yang efektifnya bagaimana dan juga seandainya vaksin Covid-19 sebutlah namanya Sinovac? Pada awal Oktober juga memang sudah bisa digunakan pada bulan apa kasus ini bisa aktif ditekan hingga di bawah 5% dan tingkat kesembuhannya mencapai 95%? Dalam hal ini saya hanya penasaran saja demikian yang saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarrakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalikusalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Jefry Romdoni dari Golkar. Kami persilakan Pak aduh. Karena apa namanya *makharijal hurufnya* luar biasa Pak tadi luar biasa tuh lupa saya tuh virus takut. Pak Jefry dari Gerindra Dapil nya SMS ya. Pak Satori silakan dari NasDem.

#### **F- PARTAI NASDEM (SATORI, S.Pd.I., M.M.):**

Terima kasih izin Pimpinan Komisi VIII.

**Bapak Komisi VIII, Pak Kepala BNPB beserta jajarannya.**



Sedikit Pak saya menambahkan mungkin untuk menanyakan yang pertama itu pada halaman 16 disebutkan dalam Pagu Anggaran RAPBN tahun anggaran 2021 tercatat pinjaman luar negeri sebesar 81 miliar akan digunakan untuk apa saja mohon dijelaskan rinciannya? Kemudian realisasi anggaran BNPB tahun 2020 hanya sebesar 50,62% atau senilai Rp.4.075.222.430.495 dari Pagu Rp.8.050.229.984.000 berarti masih ada Silpa. Tapi saat ini masih ingin mendapat tambahan kenaikan anggaran 705 miliar menjadi 813 miliar halaman 5. Kan masih ada Silpa Pak di situ?

Kemudian pada halaman 16 salah satu komponen proyek meningkatkan tata kelola resiko dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu melaksanakan program kesiapsiagaan bencana tingkat desa. Meningkatkan Pusdalop kabupaten kota. Pada kenyataannya saya mengambil contoh kasus Jakarta di Jakarta di Bendungan Hilir Gang 7 sudah 2 orang meninggal karena positif Covid-19 dan 1 orang diisolasi karena positif Covid-19. Dalam satu bulan dari 26 Juli akhir Agustus berarti 1 gang itu zona hitam. Penerapan protokol kesehatan awal-awal cukup bagus semua gang dijaga kemudian ada petugasnya. Kemudian di setiap kelurahan itu ada penggunaan dananya apakah hanya formalitas belaka pada saat awal-awal terjadi mengingat peningkatan kasus Covid-19 yang saat ini cukup tinggi? Kejadian juga kemarin malam di Kabupaten Cirebon Pak itu lumayan cukup tinggi di Dapil saya itu mantan Sekda Kabupaten Cirebon akhirnya positif Covid dan dinyatakan meninggal sampai secara protokol kesehatan.

Kemudian yang terakhir program penanganan kesehatan. Alur program penguatan Puskesmas Pak di halaman 40, pengadaan rapid test massal atau PCR sangat sedikit sekali. Masyarakat masih banyak yang keberatan untuk biaya mandiri rapid tes atau swab sehingga banyak yang tidak terdeteksi bahkan OTG. Banyak juga konstituen yang menanyakan kapan diadakan rapid test dan grafis swabnya juga Pak. Bagaimana BNPB bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam menyikapi hal ini. Terima kasih itu saja Pimpinan dan Kepala BNPB.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Satori dari Nasdem Cirebon Indramayu Pak ya? Silakan Pak Husni orang Aceh nyaleg di Sumut.

**F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VIII DPR RI.**

**Yang saya hormati sahabat-sahabat saya teman-teman saya Komisi VIII DPR RI baik hadir secara virtual maupun yang hadir secara fisik. *Wabilkhusus* yang saya hormati Kepala BNPB dan seluruh jajarannya.**

Pertama dalam RKA K/L kita menyetujui apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua BNPB. Cuma di sini ini pertama saya mau sedikit curhat *nih* Pak Doni ya. Kemarin Sumatera Utara dokter bertambah lagi dua meninggal. Istri saya saya larang *tuh dak usalah* masuk rumah sakit lagi sekarang. Kebetulan istri saya seorang dokter nggak usah masuk rumah sakit. Sumpah dokter sumpah lah itu. Kenapa di sana Pak APD itu udah kering cuci kering cuci. Saya ndak tahu apa itu yang baju apa itu namanya itu? Itu yang terjadi sekarang.

Kemudian juga yaitu ini masih curhat juga ya Pak Ketua. Saya bulan 7 turun ke Medan bulan 8 saya turun lagi ke Medan berarti kan kita turun di Bandara Kualanamu petugasnya tak ada Pak nol. Sudah lapor Pak ini sma Sestama ini kalau Sumut banyak orang mati ya biasa aja enggak ada masalah. Enggak ada orang Pak Ketua betul-betul enggak ada orang. Saya foto tuh. Jadi jangan jadi fitnah saya foto, saya foto orang enggak ada petugasnya juga enggak ada. Jadi mesinnya itu ya udah gitu aja saya enggak tahu mungkin itu boleh ya Pak ya.

Kemudian saya dapat laporan lagi namanya juga curhat Pak Ketua. Dapat laporan lagi kenapa enggak ada petugasnya? Kalian pikir kami enggak capek? Kalau capek ngapain kerja di situ? Masih banyak kok yang mau cari kerja. Jadi ndak ada istilah Medan nih loh enggak ada tuh Pak orang mati mati aja Pak.

Kemudian juga Pak di sini saya melihat bahwa apa yang masalah pengawasan yang baru terserap itu 31% nya program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas. Saya kira ini harus betul-betul diperhatikan bahwa pengawasan itu di saat masa-masa seperti ini masa pandemi itu adalah sangat-sangat penting itu Pak. Jadi memang saya sama Pak Doni salut di awal pandemipun beliau juga tinggalnya juga di kantor itu sangat luar biasa. Kemudian juga Pak yang 8 target satuan tugas penanganan Covid-19 itu salah satunya ada peningkatan *testing, tracking, dan treatment* ini kami di Sumatera Utara sebagian pesantren sudah buka Pak. Itu bagian. Jadi kita juga tidak mau terjadi kluster-kluster baru penyebaran Covid-19 di pesantren jadi sekali lagi kita minta mohon diulangi lagi supaya mohon *dong* Pak sediakanlah apa itu apa rapid test atau apapun untuk ke pesantren-pesantren kami. Supaya dulu juga Pak Ketua Komisi VIII juga pernah mengatakan saya masih takut kau anak saya ke pesantren karena nggak ada ini belum dilaksanakan. Jadi ini kita akan Komisi VIII mohonlah Pak supaya kita ini ya agak sedikit diutamakan kita takut juga bilang ketua lebih ledakan adalah bahasa Medan nya agak gitu Pak.

Jadi saya rasa apa yang dilakukan BNPB saya pikir sudah sudah banyak kemajuan ya. Juga pendekatan-pendekatan yang Bapak katakan tadi pendekatan-pendekatan sosial supaya orang pakai apa pakai masker menjaga jarak dan lain sebagainya. Saya pikir banyak tempat juga sudah mulai menerapkannya ya kita jangan sampai juga terjadi sampai resesi ekonomi seperti Singapura, Korsel, Jepang, Hongkong dan lain sebagainya.

Memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan di sebuah negara yang besar ini. Saya pikir itu Pak Ketua terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana di bandara petugasnya enggak ada? Enggak ada?

**F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):**

Bagaimana Pak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Di bandara petugasnya enggak ada?

**F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):**

Enggak ada Pak mesinnya hidup aja gitu.

**KETUA RAPAT:**

Pesawat enggak ada pilot? Di pesawat ada petugasnya kan? Ada kan?

**F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):**

Enggak ada Pak. Jadikan waktu kita turun di bandara Pak Ketua ...

**KETUA RAPAT:**

Pramugarinya ada enggak di pesawat? Enggak ini. Lanjut saya ulangi. Lanjut Bu Diah dari PDIP kalau ini enggak naik pesawat Bogor.

**F- PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dua saja pertanyaannya Pak saya coba singkat ini penyaluran dana siap pakai kan ada beberapa *nih* poin untuk Menkes. Pertanyaannya apakah ini tidak bisa difasilitasi dengan anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan sehingga harus ditaruh di sini? Karena dana siap pakai setahu saya ada standar pemakaiannya juga. Nah jadi ingin dijelaskan oleh Pak Doni apakah memang harus masuk di dana DSP *gitu* anggaran untuk Kementerian Kesehatan ini pertimbangannya apa, landasannya apa?

Yang kedua mungkin yang kita ingin tahu juga evaluasi. Ini kan ada pendekatan strategi dan lain-lain dalam penanganan Covid. Kita mantau benar itu dari PSBB ke new normal. Nah sekarang udah mulai masuk ke inovasi vaksin. Nah evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas terhadap strategi PSBB dan New Normal ini sebetulnya bagaimana sih pendekatan ini? Kelebihan dan kelemahannya atau setelah ini dari evaluasi terhadap

kebijakan itu pemerintah punya strategi apalagi dalam mengerem penyebaran Covid? Nah mungkin itu yang saya tanyakan Pak terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Diah. Pak Ali Taher silakan dari Fraksi PAN Dapil Tangerang.

**F- PAN (Dr. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan, Kepala BNPB dan Jajaran.**

Pertama dasar kerjanya ini sudah bagus konsepnya, programnya anggarannya, sasarannya sudah cukup. Kekurangannya yang masih tersisa itu adalah sosialisasi. Sosialisasi pada level-level bawah itu masih belum terlalu masif. Saya kebetulan hampir 1 minggu itu lebih dari 12 kali ke lapangan. Terima kasih dapat bantuan banyak sekali termasuk masker dan lain sebagainya itu kita sampai ke Puskesmas sebagainya dan masih kurang juga karena luas wilayah cukup luas. Jadi barangkali perlu dibantu lagi dalam konteks sosialisasi.

Saya masih melihat satu kelemahan yang mendasar yaitu pemerintah daerah seolah-olah itu lepas tangan. Meskipun sudah banyak berbuat dan pemerintah daerah ini masih merasa ini adalah penanganan Covid menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat. Nah itu yang saya melihat di lapangan dan sepertinya responsivitas ini agak terbatas. Oleh karena itu barangkali peningkatan koordinasi itu menjadi sangat penting. Kalau bagi saya anggaran sangat relatif lebih dari APBD dan sebagainya tetapi barangkali membangun kesadaran bersama-sama untuk menangani pandemi ini mesti harus dibangun kembali. Rapat koordinasi kembali. Kalau perlu setiap bulan.

Sebelumnya saya masih ingat pada waktu lalu ketika tim Covid DPR sebagai anggota. Biasanya seperti Pak Doni bicara itu loh. Jadi Covid-19 tidak habis seperti *mencet* balon. Pencet sini setelah ini ke tempat lain. Nah mutasi virus itu perlu dijelaskan kepada masyarakat yang mutasinya. Nah ini yang perlu. Pak Doni menjelaskan bagus sekali. Kan jadi artinya pencet Surabaya muncul yang lain-lain. Nah itu penjelasan tetapi sangat kena.

Kemudian yang selanjutnya adalah memang di lapangan keluhan kesah tadi penting. APD sangat terbatas kan,. sangat terbatas. Saya beberapa hari lalu ke Puskesmas juga yang tepat ketika Pemerintah untuk menangani Covid juga memang mengeluh. Masker kurang kemudian APD juga kurang terutama di Banten Raya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Saya kira ini saja.

Kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa melibatkan tokoh masyarakat itu juga penting. Organisasi kemasyarakatan. Ujung akhir ujung akhir *Civil Society* itu adalah organisasi kemasyarakatan. Nah itu perlu dilibatkan untuk mensosialisasikan. Memang sekarang mesjid sekarang ramai sekali dan tanpa ada protokol Covid. Jumat yang lalu saya khotbah jumat di masjid itu sudah dikasih batas rapat juga. Nah ini penting saya kaget juga masih di depan saya itu apa itu saya khotbah itu membludak ke atas. Jadi barangkali khatib-khatib, penceramah, ustad-ustad itu di daerah dilibatkan ini saya kira ini penting supaya mempercepat penanganan.

Pertanyaan terakhir dari guru-guru PGRI. Pak Ali tolong sampaikan sampaikan kapan Covid ini berakhir? Kapan berakhir Covid-19? Saya bilang saya nggak jawab yang bisa jawab Pak Doni. Maka saya sampaikan ya. Oleh karena itu yang perlu disampaikan karena masyarakat banyak tidak tahu karena kita juga tidak boleh putus asa terus aja. Terus sosialisasi dan sebagainya itu. Kalau perlu anggota dewan turun itu juga diambil oleh BNPB didampingi-didampingi ... juga dokter juga bisa memberi penjelasan. Saya kira itu saja terima kasih dan mohon izin kami melanjutkan rapat di Baleg. Karena masih juga terkait dengan program-program jangka pendek. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih juga atas bantuannya program di NTT berjalan dengan baik, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Dapil Tangerang Pak Doni yang digarap NTT terus. Kalau jadi kalau Covid itu belum tahu berakhirnya. Kalau puasa romadan tahu nanti takutnya sidang isbat tahu tuh kapan berakhir. Hilal berbentuk lembaran kita besok kalau kau nggak jelas kapan berakhir. Silakan.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Saya Pak Ketua. Saya dari PKB.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Achmad dari Demokrat yang saya sebut Pak Achmad Bu bukan Ibu. Pak Achmad kan Demokrat.

**F-PARTAI DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan, Anggota Komisi VIII baik yang hadir fisik maupun virtual, Pak Doni dan seluruh jajaran.**

Pertama Pak, perluantisipasi karena tanggal tanggal 4 sampai tanggal 6 September itu pendaftaran untuk Pilkada dimulai. Yang menyatakan 4 Jumat sampai Minggu terus pemilihannya tanggal 9 Desember. Nah ini kami kira perlu mendapat perhatian lebih 270 provinsi, kabupaten, kota yang akan melangsungkan Pilkada. Tentu ini akan berpengaruh terutama protokol

kesehatan seperti apa yang di waktu kampanye. Ini mesti diatur Pak karena bagaimanapun ini politik. Jadi itu yang pertama.

Yang kedua kepala daerahnya Pak, ini kepala daerah harus fokus kepada suksesi Pak tidak fokus pada Covid terus fokus ke sana. Jadi ini juga perlu diantisipasi bagaimana daerah-daerah Pilkada ini apa nama protocol Kesehatan tetap berjalan penurunan juga harus kita lakukan. Memang ada nanti bagi Ikam dan bagi yang tidak maju lagi ya kan dia memang tidak ikut Pilkada. Tapi kan dia putranya ikut di sana atau keluarganya tentunya fokus untuk memenangkan ini. Itu pertama. Kedua itu kan ada PJ nanti Pak ditunjuk oleh gubernur, menteri dalam negeri. Tapi ini saya kira juga tidak akan fokus pasti akan memenangkan terhadap Pilkada itu. Nah ini perlu kiranya diantisipasi terhadap 270 ini apalagi daerah itu termasuk daerah zona merah terutama.

Yang kedua Pak mengenai substansi seperti apa yang teman-teman sampaikan tadi ini kan lebih efektif Pak melalui Kementerian Keagamaan, punya organisasi Majelis Ulama Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai bahkan ke tingkat kecamatan. Mereka jelas struktural seluruh organisasi agama di sana. Seluruh organisasi agama Islam ada di sana. Jadi ini kalau perlu buat konkret Pak BNPB ada apa namanya MoU bersama MUI ini, sehingga seluruh ulama dari berbagai mazhab seluruh ulama berbagai organisasi itu satu suara untuk mengangani Covid ini Pak. Karena kan udah berbeda mazhab berbeda menanggapi Covid ini. Itu datang dari Allah. Ya kembali pada Allah. Nah ini yang bahaya ini ini susah ini. Tapi kalau sudah MUI yang bicara itu biasanya semuanya kan apa namanya akan serentak. Jadi kami kira peran dari ulama ini sangat penting di struktur ini.

Kemudian juga tadi Bapak menyinggung masalah BKKBN Pak. Itu udah enggak jalan sekarang karena keluarga berencana itu dianggap penting karena lagi dulu setiap desa ada namanya PPLKB. Sekarang itu enggak ada lagi dan petugas khusus mengenai PPLKB. Bahkan sekarang di kabupaten/kota itu, itu ... ditupangkan itu salah satu Lembaga atau OPD yang ada di kabupaten/kota. Jadi saya bukan mendahului tapi tidak efektif Pak BKKBN ini terutama di kabupaten/kota enggak ada instansi itu sekarang. Instansinya ada tapi tidak efektif. Jadi itu ... dulu PPLnya ada Pak. Sekarang enggak ada PPL-nya. Jadi saya kira lebih baik kita apa namanya kepada struktur agama ini. Karena 85% iya Islam Kenapa ndak porsi yang besar ini kita apakan?

Dan terakhir Pak ini masalah zonasi ini. Ini yang selalu kita bicarakan yang daerah merah, oranye, kuning sedangkan hijau tidak ada petunjuk khususnya. Mereka ini kan tidak ada masalah sebetulnya Pak. Nah perlu petunjuk secara teknis terutama soal pelajaran mereka. Anak-anak didik kita, peserta didik kita. Kita terlalu fokus mengurus yang bermasalah yang tidak bermasalah diabaikan. Karena terikut-ikut itu mereka belajar di sana ndak boleh. Ini contohnya kabupaten saya Pak, itu daerah zona hijau. Tapi bupati tidak membolehkan pondok pesantren buka. Tidak boleh dianukan. Nah ini

perlu dari pusat petunjuk zona daerah hijau ini seperti apa? Terutama di dalam pendidikan.

Kedua dalam suatu pesta perkawinan. Ini juga jadi masalah sekarang Pak. Orang mau nikah nggak boleh lebih dari 20 orang padahal daerah-daerah hijau. Dia orang kaya di orang hebat di situ mau mengundang orang sekampung biasalah kebanggaan Pak. Nggak boleh. Padahal yang positif enggak ada disana. Sebetulnya enggak masalah sebetulnya. Jadi perlu dari pusat ini sehingga kepala daerah tidak ragu-ragu terhadap daerahnya yang merah, hijau itu. Jadi saran kami sehingga nanti tidak seluruhnya persoalan seolah Indonesia ini Covid semua. Padahalkan tidak begitu.

Nah kemudian tentu dimudahkan lah Pak desa tangguh ini. Terutama desa-desa yang tidak persoalan Covidnya kita mulailah desa tangguh. Saya setuju sekali Pak desa tangguh terutama kami di Riau untuk mencegah bencana alam terutama kebakaran. Jadi saya kira itu saja dari saya Pak. Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Ahmad.

**F- PKS (K.H. BUKHORI, L.C., M.A):**

Ketua daftar ketua.

**KETUA RAPAT:**

Yang jelas memang betul Pak Doni besok dimulai Pilkada yang sangat masif Pak. Mereka kalau *ndaftar* deklarasi nggak ada lagi tuh Pak protokol Corona Pak. Jingkrak-jingkrak *dangdutan*, pawai Pak. Pokoknya mantap lah ini Pak Pilkada. Pilkada tanpa Corona kira-kira begitu terasa begitu Pak sementara Corona Masya Allah luar biasa. Silakan Pak Kyai Bukhori. Dari PKS silakan Pak.

**F- PKS (K.H. BUKHORI, L.C., M.A):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pak Pimpinan, Pak Yandri Susanto dan seluruh jajaran Pimpinan serta Anggota Komisi VIII yang saya hormati.**

**Pak Doni dan seluruh Jajaran yang saya hormati.**

Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya masih sehat ini penting sekali saya sebut. Jadi nikmat kesehatan pada hari ini sangat-sangat terasa dan sangat-sangat menjadi dambaan setiap orang. Tanpa Kesehatan tidak punya mana apa-apa sebenarnya. Izinkan saya ingin menyoroti dua sisi Pak.

Sisi yang pertama terkait dengan pelaksanaan atau realisasi anggaran 2020 tadi saya sama juga dengan teman terdahulu bahwa realisasi ini baru 50,602% sehingga kita tinggal punya waktu beberapa bulan ke depan bagaimana cara menyelesaikan ini? Cara mengoptimalkan supaya anggaran ini tidak memiliki Silpa yang tinggi? Kemudian kita sebagai mitra tentu punya kepentingan agar semua mitra-mitra kita ini bisa menyelesaikan anggarannya secara tepat waktu dan secara maksimal agar terperdaya dalam semua sisinya. Apalagi BNPB ini salah satu lembaga yang sangat ditunggu kehadirannya dan sangat sangat urgent dalam situasi khususnya sekarang ini. Jadi sekali lagi mohon jelaskan bagaimana cara penyelesaian sisinya? Dan tentunya sebagai mitra kita tentu selalu berusaha bersinergi dan mendukung. Itu yang pertama Pak.

Yang kedua masih terkait dengan masalah penyaluran. Ini juga termasuk ada penyaluran ke Eijkman dan juga Universitas Airlangga. Beberapa waktu yang lalu kan ada satu berita bahwa di Universitas Airlangga yang sudah disampaikan oleh rektornya itu kan menemukan obat-obat anti Covid ini gimana ceritanya sampai sekarang ini? Apakah kemudian terkendala dalam aspek urusan formalnya di BPPOM-nya ataukah itu merupakan satu berita yang tidak perlu dipercaya? Ini saya kira juga perlu dijelaskan. Dan kemudian yang kedua kalau kemudian juga diberikan lembaga Eijkman ini hasilnya apa Bapak? Ini kan lembaga riset yang resmi yang memang Airlangga adalah merupakan wakil posisinya adalah posisi wakil ketua Eijkman-nya ada di sana. Jadi saya pikir ini penting karena kita tunggu kalau kemudian sekarang kita sudah punya apa namanya obat sendiri ini luar biasa ini kalau memang itu betul saya kira itu tolong diberikan ini. Dan kemudian Pak apa namanya hasil dari pada Eijkman itu kira-kira apa yang bisa dibuktikan ke masyarakat? Sampai sekarang.

Masih terkait dengan penyaluran dana siap pakai Pak. Dana siap pakai. Memang ini tadi hampir mirip pertanyaan saya dengan teman ... yang terkait dengan beberapa pos untuk Kementerian Kesehatan ya ini. Kan di sini ada fasilitas pelayanan juga ada 189 sekian lalu kemudian surveilanse dan dan karantina ini juga Kementerian Kesehatan lalu kemudian banyak ini posnya semua Kementerian Kesehatan. Jadi pertanyaan saya hampir mirip jadi apakah di Kementerian Kesehatan tidak ada posnya itu sehingga kemudian dari pos dari DSP ini? Ini terkait dengan realisasi ini Pak karena saya tidak ingin masuk angka-angka lebih detail untuk kemudian pembahasan saat karena mesti kita punya waktu lagi untuk sekali lagi mendetilkan terhadap kegiatan ini.

Dalam prakteknya Pak isolasi mandiri ini jadi penting karena setahu saya seingat saya kalau tidak salah rumah sakit yang menjadi rujukan untuk Covid khusus Indonesia hanya 800. Sementara ... atau tempat tempatnya hanya kapasitasnya 4000 sementara jumlah yang terinfeksi positif sekarang sudah lebih dari 130.000 hampir 200.000 lebih eh 170.000 dan ini kan membutuhkan berarti bahwa isolasi mandiri sangat penting. Cuman yang



perlu diperhatikan Pak jadi ketika masyarakat sudah sadar isolasi mandiri ini pertanyaannya bagaimana caranya ketika dia mau Swab? Melakukan satu PCRE? Ketika dia orang yang mampu mungkin dia bisa langsung hubungi ke rumah sakit langsung mengisolasi di mobilnya. Tetapi ketika dia harus lapor kepada Puskesmas ini pertanyaannya petugasnya tidak mungkin datang ke rumah tetapi ketika jadi jemput ini menjadi suasana gaduh lingkungannya. Ini juga saya kira perlu diperhatikan ini sepele tetapi kalau itu terjadi diberi ribuan titik ini kan akan menjadi masalah. Ini istilahnya begini sekarang masyarakat itu disebagian masyarakat tertentu atau khususnya bukan masyarakat bahkan di Kota Jakarta sekalipun. Jadi ketika ada dalam satu rumah itu ada yang positif -positif Covid- itu lingkungannya pasti akan melakukan satu penolakan secara Psikologi. Dan ketika kemudian ketahuan ada petugas kesehatan datang ke rumah tersebut, ini akan menimbulkan psikologi yang lebih meluas. Jadi bagaimana cara-cara apakah kemudian bisakah misalnya yang bersangkutan yang positif tersebut itu datang ke Puskesmas langsung. Nah kalau kemudian begitu protokolnya seperti apa? Itu nampaknya ini di pemerintah daerah juga belum melakukan itu. Ini masih terkait dengan situasi.

Nah kemudian Pak saya merasakan dari berbagai macam survei ya ada tiga survei yang kemudian saya baca itu. Yang terakhir survei LKSP itu. Dalam penanganan Covid pemerintah itu kan kepercayaan masyarakat yang rendah sekitar lebih dari 70% tidak puas. Nah salah satu memang ketidakpuasan itu memang problemnya adalah pola penanganan manajemen. Saya ingin mengatakan begini bahwa ada situasi psikologi publik yang sebenarnya semacam kira-kira *hopeless* mohon maaf survei tadi sebenarnya 8 bulan Agustus terakhir tanggal 7 Agustus kemarin Pak. Itu kemudian *hopeless* karena itu kemudian hampir cuek, cuek tidak datang sudah kelamaan. Satu contoh yang paling kecil dua pekan terakhir -Sabtu Minggu Sabtu Minggu Jumat Sabtu Minggu- Puncak itu semua penuh Pak. Jadi bagaimana suasana Puncak ketika melihat televisi itu sebegitu padatnya. Lalu kemudian situasi operasi kembali itu kemudian ya tadi disampaikan Pak Ketua tadi Pak Yandri, jadi masyarakat boro-boro mengambil masker yang sudah males Pak. Jadi ada situasi *hopeless* ini. Kalau *hopeless* menurut saya ini memang penanganannya tidak satu-satu tadi. Itu penting tapi saya kira penanganan dari sisi lain dari ... .

Jadi kalau saya melihat terkait dengan masalah penanganan ini ke depan ini sudah masuk ke depan tadi saya setuju ada penanganan ketahanan bencana. Jadi tetapi kemudian karena 3 strategi strategi pertama ada PSBB, kemudian ada strategi new normal lalu kemudian ada apa di DKI tahap menuju apa new normal 1 transisi. Itu semua hanya penggantian istilah. Tapi perilakunya dia dia juga. Itu juga. Jadi tidak ada apa-apa. Sehingga saya mengetakan saya nggak tahu apakah sudah ada sebuah satu penelitian strategi dianggap sukses atau gagal? Kalau dianggap sukses kenapa kemudian bahwa kondisi Covid bukan kemudian semakin melandai tetapi sampai kita masih belum tahu kapan titik puncaknya itu masih belum tahu.

Kalau ke titik puncak kita belum tahu bagaimana kemudian meramalkan berakhir tadi? Semakin tidak tidak jelas. Jadi kalau kemudian saya melihat strategi ini kemudian tidak sukses, saya kira Bapak nanti akan masuk ke dalam ketahanan bencana juga akan tidak jelas lagi.

Nah oleh karena itu saya permintaan, kami mohon ada satu penilaian ada satu penilaian bagaimana sukses atau gagal dari seperti sekarang ini baru dari situ kemudian nanti masuk ke dalam tahapan berikut. Sebenarnya tahapan berikut ya hanya sekedar sebuah satu upaya-upaya strategis, upaya sisi lain ekonomi khususnya mau digerakkan itu sebenarnya persoalannya. Nah kemudian sebenarnya tidak masalah kita membuat tahapan ketahanan bencana ini penting tetapi ada tiga hal yang sangat mendasar, saya pertama aspek kesehatan oke, kedua adalah perilaku budaya tadi dengan sosialisasi oke. Tapi ketiganya Pak ya itu tadi hopeless supaya hopeless-nya ini kemudian tidak semakin liar harus ditata spiritualitasnya.

Tadi saya setuju sekali apa namanya usulan Pak Ahmad tadi bahwa BNPB supaya melakukan satu gerakan secara konkret bukan sekedar ceramah bukan. Tapi gerakan konkret bersama Majelis Ulama secara simultan. Majelis Ulama sudah membuat fatwa dan melakukan macam-macam setahu kami. Sudah bagus. Tapi kemudian gerakan bersama untuk penyadaran. Penyadaran supaya apa namanya spiritual ini naik dan seterusnya. Dan dari berbagai macam riset bahwa ketahanan fisik manusia ini 80% yang ditetapkan atau ditentukan oleh adanya ketahanan imunitas/inner beauty-nya atau dan karena itu maka.

**KETUA RAPAT:**

Kalau bisa dipersingkat Pak.

**F- PKS (K.H. BUKHORI, L.C., M.A):**

Ya terakhir Pak. Jadi karena itu kemudian kami mengharapkan bahwa di dalam program ke depan Pak, program ke depan ini bisa diarahkan kepada satu ketahanan bencana yang lebih simultan dan nanti kami akan rapat kembali di pekan-pekan akan datang dengan Sekjen atau Sekretaris Utamanya dengan jajaran untuk kemudian men-detilkan tetapi arahnya bagaimana ketahanan bencana yang bersifat simultan bukan hanya dari aspek Kesehatan dan perilaku. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Kyai Buukhori saya perpanjang dulu waktunya ya? Karena kan jam 12.00 sampai jam berapa *nih*? Setengah satu? 13.00.

**(RAPAT: DISETUJUI)**

Silakan Pak Muhammad Ali Ridho dari Golkar Madura Raya.

## **F- PARTAI GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII.  
Yang saya hormati Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo beserta jajarannya.**

Apa yang disampaikan dari RKA K/L ini luar biasa. Tapi saya hanya inginkan tadi sudah beberapa kawan sudah mempertanyakan. Ada yang ingin saya sampaikan di sini mengomentari tentang pesan daripada Ibu Iriana Joko Widodo yang saya melihat pesan ini terlihat sederhana tetapi sangat penting sekali. Disampaikan di sana pesannya “Ayo pakai masker” kemudian “Jaga Jarak dan Cuci Tangan”.

Ayo pakai masker, saat ini saya melihat di beberapa daerah sudah mulai punya kecenderungan orang menurun untuk kesadarannya, untuk menggunakan masker. Rerutama di daerah-daerah khususnya kebetulan Dapil saya Madura terkesan orang sudah tidak ingin menggunakan kembali. Tapi tidak hanya di Madura. Di Jakarta pun saya melihat masih di beberapa wilayah Condet misalnya -karena kebetulan saya disana- itu banyak sekali yang sudah kesadarannya untuk menggunakan masker itu sangat menurun.

Kemudian yang kedua jaga jarak. Tadi Pak Doni Monardo juga menyinggung soal usulan kepada Pemprov DKI untuk kembali membatalkan ganjil-genap karena itu ketika dijalankan sekarang meningkatkan jumlah penumpang kereta ataupun penumpang umum. Sehingga saya melihat Pak saya pernah mencoba untuk menaiki angkutan umum itu hampir-hampir bukan hamper tapi bisa saya katakan normal kembali Pak seperti belum adanya Covid.

Lalu kemudian tempat-tempat hiburan yang tadi siapa yang menyinggung soal Puncak itu ramai? Kalau Puncak Pak saya pikir orang begitu nyampai di Puncak, dia mungkin akan tinggal di vila-vila yang hanya keluarga mereka sendiri. Tetapi di tempat-tempat hiburan seperti Dufan dan tempat-tempat hiburan yang lain kalau itu masih buka dengan kerumunan yang hampir tiada jarak, itu kemudian saya melihat ada kontradiksi dengan ajakan tadi. Nah itu mohon nanti penjelasan. Kalau cuci tangan mungkin di tempat-tempat tertentu sudah memang sudah menyediakan di rumah misalnya. Tetapi yang paling terlihat itu adalah Ayo pakai masker dan jaga jarak. Itu yang kemudian saya sangat setuju untuk kemudian ikut menggalakkan kampanye ini. Komentar saja Pak.

Tapi pertanyaannya itu ya itu tadi beberapa tempat hiburan masih buka di DKI Dufan itu masih buka. Karena kebetulan anak saya meminta saya mohon untuk mengizinkan mau ke Dufan dan saya masih melarangnya karena tingkat pandei ini masih tinggi. Per hari ini DKI kalau nggak salah DKI kemarin maksud saya itu ranking satu lagi untuk pandeminya.

Berikutnya Pak Doni Monardo hanya menegaskan lagi tambahan mengenai pemeriksaan rapid ataupun pembagian masker ke pesantren ataupun madrasah ini agak kecil sekali perhatiannya. Sehingga saya berharap untuk ke depan ini kami mohon ada perhatian khusus kepada pesantren-pesantren untuk memberikan rapid secara gratis dan masker. Sehingga supaya tidak menimbulkan kluster baru seperti yang kemarin kita sama-sama ketahui di Banyuwangi.

Tambahan Pak Doni Monardo ini tadi sudah disampaikan soal isolasi mandiri, dari Dapil saya Pak Doni. Saya Madura ada 4 kabupaten di sana Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Kemarin itu saya mendapatkan masukan dari satu kawan di rumah sakit RSUD Sumedang Muhammad Anwar bahwa rumah sakit tersebut sampai saat ini tidak memiliki alat swab PCR. Nah sementara yang terdampak covid di sana sudah mulai cukup banyak. Jadi saya mohon Pak Doni monardo untuk memperhatikan ini untuk bisa segera memberi bantuan alat rapid PCR ini sesegera mungkin agar supaya tidak terlalu lama untuk orang melakukan pengetesan dan mendapatkan hasil. Itu saja dari saya Pak Doni terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam.* ... Pak sulit bukan solid. Terima kasih Pak Ali masih ada dari? Pak Haji Sungkono?

#### **F- PAN (H. SUNGKONO):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh rekan-rekan Komisi VIII.**

**Yang kami hormati Pak Doni dan seluruh jajarannya.**

Saya bicara untuk APBN ya Pak ya. Jadi rencana kerja Bapak ini di sini masih ada merencanakan pinjaman Bank Dunia. Saya tahu hutang kita besar Pak. Apa tidak ada jalan lain tidak menggunakan pinjaman lagi Pak? Saya khawatir pasti akan jadi menambah beban anggaran kita secara umum bisa memberatkan, satu.

Kedua dari aspek koordinasi saya melihat sekarang ini bukan fokus ini pimpinan atau kepalanya Bapak itu. Sekarang ini justru yang menangani kasus Covid nasional Menteri BUMN itu. Itu apa targetnya bicara ekonomi? Saya melihatnya begini Pak gimana ekonomi tumbuh kalau masyarakatnya bisa bekerja begitu ya? Masyarakat bisa bergerak bisa memperoleh sumber daya kehidupan pasti juga ekonomi tumbuh itu. Kalau sekarang ini dibiarkan ekonomi dulu apa sasarnya tepat gitu? Jadi ini mungkin tingkat koordinasi kementerian di saat Bapak melakukan Ratas dengan kementerian mohon ini sampaikan itu. Karena banyak masyarakat melihat yang fokus adalah kesehatan dulu Pak bagaimana masyarakat bisa hidup normal kalau bahasanya new normal kemarin bisa melakukan aktivitas bisa mengurangi

resiko jangan sampai terpapar virus secara teknis. Bagaimanaantisipasi dulu preventifnya dulu? Bagaimana tidak terpapar? Setelah itu ada namanya penanganan kalau memang ada terpapar dan teknik Bapak sudah melakukan langkah-langkah rapid pcr semuanya secara kesehatan sudah melakukan itu. Jadi saya mohon ini lebih serius dulu mengenai penanganan kesehatannya.

Anggaran APBN untuk Covid ini besar sekali Pak saya melihatnya ya separuh saja kita layani maskernya Pak itu tidak lebih dari lebih dari 50 trilyun untuk penanganan ini. Umpunya 1 tahun setiap individu diberi 10 per bulan selama 1 tahun kita asumsikan 1 tahun, kalau virus ini belum bisa dikatakan dalam jangka pendek ini selesai ukurannya penanganan dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker jadi harus diukur di situ dulu.

Kedua dari sosialisasi tadi Bapak juga banyak yang menyampaikan ada sedikit keraguan bagaimana menggunakan badan perencanaan BKKBN ya Pak ya? Ya saya pikir itu mungkin lembaga ini agak sedikit tenggelam kemarin beberapa saat tidak pernah jadi pembicaraan orang gitu ya. Jadi mungkin banyak sekali badan-badan yang mungkin lebih bisa semua merasa bertanggung jawab tidak hanya dirasakan salah satu apa kelembagaan BKKBN itu. Jadi tadi tokoh masyarakat siapapun barangkali ini tugas negara melalui Lembaga masyarakat seluruhnya tidak satu dua jadi tugas sosialisasi. Jadi semua kewajiban. Jadi tidak hanya fokus ke satu atau beberapa lembaga saja itu.

Nah saya juga lagi bagaimana menangani virus ini dengan vaksin. Jangan kita ketergantungan Pak kesan kita ini bicara penanganan saja gitu kan banyak lembaga penelitian di Indonesia dan perguruan tinggi yang harusnya diberikan beban tugas berat ini ... masalah kalau umpamanya negara lagi punya persoalan besar harus mereka diberdayakan gitu. Jangan biasa-biasa aja gitu harus dengan luar biasa bagaimana cara kita menekan mereka supaya menghasilkan suatu produk yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Jangan sampai virusnya nanti ketergantungan negara lain dijadikan komoditas politik dan ini adalah saya dalam merugikan ekonomi nasional. Kita kalau bisa ditangani secara nasional. Kalau dengan uang biar masuk ke dalam negeri itu kalau yang nangani dari virus ini dari luar negeri sepertinya kita ketergantungan mereka gitu. Jangan sampai kekuatan ekonomi akan terus karena adanya penanganan Covid ini Pak.

Saya juga perlu meminta pemerintah memberikan apresiasi kepada siapapun lembaga, perorangan yang mampu membuat semacam kalau dikatakan vaksin belum bisa apa saja yang bisa meyakinkan masyarakat ini bisa melawan virus. Kan tadi virus ini pada mental Pak kalau orang sudah mentalnya jatuh mungkin disitu kita diserang gitu ya Pak. Mohon ada lembaga atau individu per orang yang di situ medsos ada tapi jadi masalah di medsos juga. Mari kita berdayakan itu semua melalui koordinasi. ... atau tidak yang penting tidak membahayakan. Kalau berbahaya yang akan kita larang itu. Ini kan emergency Pak yang orang viral itu saya dengar orang Lampung itu menghasilkan suatu minuman yang dikatakan tuh penangkal atau membuat

daya tubuh kita itu kuat. Karena Jawa Timur juga ada Pak seperti itu hanya belum dipublikasi secara terbuka hanya orang-orang yang terbatas. Artinya mereka juga punya inisiatif untuk melawan itu. Mereka juga punya inisiatif, jangan dikebiri justru akan menjadi persoalan social ada yang disalah satu lembaga ini dianggap macam-macam yang penting masyarakat percaya itu barang dan tidak berbahaya. Yang penting adalah mengurangi beban sosial masyarakat supaya PD itu Pak. Jadi mohon itu di dorong semuanya bila perlu. Saya mohon dengan hanya sosialisasi termasuk juga mendorong setiap dengan perguruan tinggi yang dirasa punya tanggung jawab untuk berbuat untuk kasus Covid ini Pak.

Mengenai anggaran saya pikir semua pasti mendukung Bapak. Saya justru sangat kaget gimana waktu ada perubahan kepemimpinan dapat diambil di kementerian yang lain yang orientasinya mungkin ekonominya itu. Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Sungkono. Kita ke virtual, Bu Anisah Syakur.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Masih satu Pak kiri.

**F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

**F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Kedengaran nggak Bu suara kami?

**F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag):**

Dengar.

**Bapak Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Pak Doni dan staf yang saya hormati.**

Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama saya langsung saja menyampaikan yaitu bahwa mohon maaf bahwa kita dalam anggaran yang diajukan dalam versina tadi bahwa kita ini dalam penanganan bencana itu bersifat lintas sektoral sebagaimana juga sampaikan oleh Menteri Keuangan. Dana untuk bencana alam memang tak terpusat pada anggaran BNPB saja penanganan bencana itu bisa melalui sebuah mekanisme on call

atau dana siap pakai bisa dcaikan kapan saja. Artinya pemerintah juga mempunyai satu konsep atau dana itu bisa ada di kementerian mana-mana ada Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial, yang ingin kami tanyakan bagaimana mekanisme koordinasi antara lintas kementerian ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan program-program yang dilaksanakan.

Yang kedua tadi banyak dibicarakan masalah penanganan covid memang kita sangat prihatin dengan masih tingginya yang zona merah, yang merah makin merah yang hijau justru malah menurun ini juga memprihatinkan kita semua tentu ini butuh penanganan yang serius dari semua yang berperan di dalam hal itu terutama BNPB tentunya sudah memprogramkan ke depan bagaimana supaya antisipasi lebih diutamakan daripada pengobatan dari pada penanganan. Tadi sudah banyak di singgung oleh teman-teman bagaimana kita melakukan penguatan-penguatan bagaimana koordinasi dengan para ulama dan yang lain. Tentu ini adalah merupakan bagian untuk mempercepat bagaimana agar Covid ini tidak terus makin besar tapi bagaimana bisa menurun.

Dan yang tidak kalah penting juga bahwa penanggulangan penanggulangan dan penanganan bencana itu harus dimulai dari mitigasi. Yang kami maksud bukan hanya masalah Covid tapi juga masalah masalah masalah yang lain seperti masalah banjir upaya untuk mencegah itu tentu harus juga mempunyai dilakukan sejak dini bagaimana saja untuk bencana-bencana yang semestinya bisa dicegah. Seperti yang kita ketahui masih banyak di daerah-daerah itu terjadi banjir, longsor dan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat masif dan terus terjadi. Namun kita juga mendapatkan fakta bahwa banyak masalah banjir dan tanah longsor yang terjadi karena adanya pembangunan yang kurang kontrol yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Sejauh ini yang ingin kami tanyakan BNPB bagaimana bisa menjangkau terhadap hal tersebut agar supaya tidak terjadi pembangunan-pembangunan yang bisa menyebabkan banjir maupun longsor? Atau apakah BNPB sudah membentuk tim ataukah ada komisi khusus dalam penanganan tersebut sehingga bagaimana agar supaya menjaga ini lebih baik daripada -kalau dalam istilah kesehatan itu menjaga lebih baik daripada mengobati- disini bagaimana baik masalah Covid masalah banjir longsor ini bagaimana supaya ditangani sejak dini? Agar wilayah-wilayah yang sering banyak bangunan-bangunan yang tidak ramah lingkungan ini bisa di-stop dan tidak diteruskan tidak terjadi banjir secara terus-menerus. Disini sehingga kita akan banyak mencegah bencana yang lebih baik daripada selalu terus terjadi. Itu tambahan kami mudah-mudahan ada manfaatnya kami akhiri dengan *Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*.

**F- PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Pimpinan, Selly Andriany diizinkan?

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Bu kita kembali ke rapat kembali ke Ruang Pansus dulu Bu. Silakan Pak Nanang Samudra dari Demokrat.

**F- PARTAI DEMOKRAT (Ir. H. NANANG SAMODRA K.A., M.Sc.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan yang saya hormati.  
Bapak Kepala BNPB dan seluruh jajaran BNPB.**

Untuk naskah dokumen yang disampaikan dalam BNPB ini saya melihat ada yang aneh. Kalau untuk Pimpinan warnanya yang color yang lain warna yang putih, biasanya enggak seperti ini. Mudah-mudahan ini mepet waktu saja ini bukan karena anggaran kan?

Kemudian yang kedua untuk RKA K/L 2021 prinsipnya kami Partai Demokrat setuju namun pembahasan lebih pada tingkat Sestama dan deputi nanti disitu kita akan diskusi lebih dalam. Kemudian mengenai isu-isu aktual kami fokus kepada tenaga kesehatan. Kemudian sebagai garda terdepan di lapangan itu adalah Puskesmas dan bidan-bidan desa. Di situ mereka sangat terbatas sekali memiliki alat pelindung diri padahal mereka tidak bisa membedakan mana masyarakat yang terpapar dan mana yang tidak terpapar. Itu sangat sulit dibedakan. Jadi mereka semestinya harus melengkapi diri dan atribut untuk memenuhi syarat bahwa mereka bisa terbebas dari virus Covid ini. Oleh karena itu kami menginginkan kepada mereka itu mungkin diberikan kesempatan untuk melakukan tes swab test cara gratis. Jadi apabila merasa ada sesuatu yang aneh langsung segera diswab dan gratis tidak dibebankan kepada pribadi-pribadi mereka.

Kemudian kami menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya lebih dari 100 dokter karena tertular Covid. Walaupun kami agak sedih di TV mendengar bahwa Menteri Kesehatan mengatakan bahwa ah itu kan karena kurang disiplin saja menggunakan alat. Kami kecewa dengan Menteri Kesehatan yang seperti itu.

Yang terakhir untuk edukasi kepada masyarakat di kelurahan kami di di Cijantung kemarin Kalisari Cijantung. Di situ kalau ketahuan tidak pakai masker langsung dimasukkan ke keranda mayat, keranda. Kemudian itu berapa hukuman dan orangnya kapok-kapok minta ampun itu biasanya bagus untuk diterapkan sehingga mereka sadar dari yang tadinya tidak percaya dan menjadi menyadari bahwa terus kamu mati itu seperti apa rasanya. Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



## **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.* Pak Nanang Samodera dari Demokrat. Kami ke virtual kembali silakan Mpok Selly dari PDIP.

## **F- PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### **Yang saya hormati Pimpinan beserta jajaran Anggota Komisi kemudian BNPB beserta jajaran.**

Saya hanya akan menambahkan saja bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Doni selaku Ketua BNPB. Kita menyadari pentingnya peran BNPB bagi kehidupan yang akan datang. Apalagi disampaikan oleh Pak Ketua Covid 19 ini bukan hanya langsung di tahun 2021 saja tetapi sampai dengan 2020. Saya justru sangat menyayangkan dengan porsi anggaran yang sangat minim memang kalau kita berbicara peran BNPB ini sangat multitasking ya, sangat berguna dan dibutuhkan oleh kita semua. Bahkan kalau kita berbicara tentang ketahanan bencana kemudian tentang manajemen yang tadi disampaikan oleh Pak Doni bahwa rasanya untuk ketahanan bencana ini perlu detail lagi Pimpinan kalau memang diizinkan oleh Pimpinan.

Karena memang kalau saya breakdown Kembali kalau menyangkut masalah mitigasi dan kemudian yang menyangkut dengan resiko bencana yang mungkin nanti kita akan lakukan dalam bentuk edukasi kepada daerah apalagi tadi Pak Doni sudah tadi menyampaikan beberapa daerah ada yang dengan kategori merah, hijau kemudian kuning dan ini perlu mendapatkan kesadaran menuju kepedulian terhadap bencana.

Tetapi satu hal Pimpinan yang harus disadari oleh kita semua bahwa ke depan kita sudah membahas tentang RUU Cipta Kerja dimana Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kesempatan kepada investasi kemudian investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Tetapi yang seringkali menjadi pemikiran kami yang ada di Panja kemudian Badan Legislasi bagaimana dengan keberlangsungan lingkungan hidup? Apalagi kalau kita berbicara tentang antisipasi kebutuhan air tanah. Kemudian kita berbicara ... area. Sementara tadi disampaikan oleh Pak Ketua BNPB resiko bencana kita tiap tahun bencana di Indonesia mengalami peningkatan secara terus-menerus. Tetapi justru anggaran untuk antisipasi untuk mitigasi anggarannya sendiri juga sangat kecil. Nah ini perlu pembahasan khusus menyangkut dengan mitigasi bencana termasuk apa yang sedang kita lakukan dengan RUU Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana ini rencana kita menginginkan bahwa ada porsi anggaran yang akan kita apa akan kita perbuat dengan antisipasi masalah Covid ini kita mengalami kegagalan. Tetapi satu hal bencana itu bukan hanya bencana alam, Covid ini bukan bencana alam. Saya baru saja mendapat membaca suatu jurnal tentang kimia, nuklir, dan biologi kimia ke depan mungkin ... mengantisipasi bencana itu mungkin ke depan adalah

nuklir dan kimia biologi kimia biologi. Nah kemudian Pak pemulihannya harus seperti apa saya melihat bahwa dari anggaran yang dianggarkan oleh rtmpt ini perlu adanya penguatan kembali dan rasanya untuk saat ini saya masih membutuhkan keterangan dari Pak Doni apa sih yang sudah dilakukan BNPB dalam rangka antisipasi mitigasi terhadap proyeksi bencana-bencana yang ada di Indonesia? Kalau kita bicara tadi hanya berbicara mengenai alam kemudian secara non alamiah -wabah- hanya berbicara tetapi ada di depan mata kita berbicara nuklir dan biologi kimia. Dan mungkin itu saja pimpinannya ingin saya tambahkan. Dan satu hal mengenai anggaran ... disampaikan bahwa DSP 250 miliar ini rasanya terlalu kecil karena sekarang aja kita menganggarkan hamper 7 miliar lebih. Tapi mungkin perlu ada kajian ke depannya terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarrakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Sebenyar Bu Selly. Ini Bu Selly mau ke mana ini? Jangan goyangannya terlalu kencang.

**F- PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Saya mau ke pesantren dulu Pimpinan mau jemput anak saya.

**KETUA RAPAT:**

Bukan ini goyangannya terlalu kencang ini.

**F- PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Mohon dimaafkan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu. Silakan Pak Asli Chaidir.

**F- PAN (H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.  
Yang saya hormati Bapak Kepala BNPB beserta seluruh jajaran.**

Saya Asli Chaidir dari Dapil Sumatera Barat I dari Fraksi Amanat Nasional. Terima kasih banyak Ketua pada kesempatan ini berkaitan dengan bidang anggaran untuk anggaran tahun 2021 besar anggaran BNPB sebagaimana telah dipaparkan terdapat peningkatan dari Pagu Indikatif sebesar 715,4 miliar menjadi 813,1 miliar. Saya ingin menanyakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, berapa jumlah dana siap pakai yang dialokasikan Pemerintah untuk penanggulangan bencana di tahun 2021? Karena pada paparan kepala BNPB hanya menyebutkan jumlah DSP sebesar

200 miliar sedangkan pada tahun 2020 saja berjumlah 6 triliun dan terdapat penambahan DSP untuk penanganan Covid-19. Mohon maaf kalau saya bahannya beda yang dipaparkan oleh Kepala BNPB.

Kedua, BNPB dalam struktur penanggulangan nasional dalam penanggulangan Covid-19 ini berubah yang awalnya menjadi kepala gugus tugas menjadi satuan tugas di antara target satgas adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung penanggulangan Covid-19. Namun jika melihat kondisi sekarang dimana jumlah orang terpapar Covid-19 agaknya masih meningkat. Pernah mencapai jumlah kasus dalam per hari 3000 orang ini menunjukkan target perubahan perilaku tersebut tidak tercapai karena merubah perilakunya bukan ke arah yang lebih baik tetapi ke arah yang sebaliknya. Mohon dijabarkan kendalanya dan apakah dengan posisi BNPB berubah menjadi target akan lebih efektif?

Ketiga, saya selaku wakil dari Dapil Sumbar I ingin menegaskan kepada Satgas Penanggulangan Covid-19 bahwa negara kita saat ini makin terpuruk baik dari segi penanganan Covid-19 maupun dari segi pemulihan ekonomi nasional. Dan mohon juga disiapkan strategi dalam menghadapi kemungkinan bencana social yang mungkin akan terjadi. Pada paparan anggaran 2021 menyebutkan untuk alokasi anggaran untuk rehabilitasi dan ... untuk wilayah Sumbar supaya kami dapat juga untuk memahami dan mengawasinya.

Terakhir saya laporkan kondisi Sumbar sekarang ini sangat mencekam. 7 kepala daerah dan sekedanya terpapar Covid positif. Dan juga terdiri dari Bupati Pariaman, petinggi Sumbar, Wakil Walikota Padang, Walikota Payakumbuh.

#### **KETUA RAPAT:**

Wakil Walikota Padang anak saya dong bilang Pak. Gitu.

#### **F- PAN (H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H.):**

Kota Padang. Paling besar di Kota Padang juga positif corona ini. Yang tentu perlu kerja keras kita bersama sebagaimana disampaikan oleh Ketua BNPB untuk menyadarkan masyarakat ini juga agak berat dan kepala daerah sendiri juga ... berat ya karena terbatas juga kondisi keuangannya. Keuangan daerah itu kan sangat kecil sekali. Jadi mungkin banyak masukan juga kita dorong bagaimana secepatnya vaksinasi Covid-19 ini segera kita dorong untuk supaya masyarakat sudah merasa yakin. Tapi kalau sekarang ini makin lama makin mencekam juga. Imunnya akan turun. Untuk itu minta berdoa mendorong bagaimana vaksin ... di Indonesia jangan kita harapkan dari negara lain saja. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa melaksanakan dan menghasilkan vaksin untuk Covid-19 ini. Demikian saja Bapak BNPB dan jajarannya Pak Ketua terima kasih mohon maaf jika tidak berkenan dalam penyampaian saya.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam.*

Kami persilakan Pak Iskan Qolba dari PKS secara virtual.

**F- PKS (H. ISKAN QOLBA, M.A):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Suaranya jelas Pak?

**KETUA RAPAT:**

Jelas Pak. Lanjut Pak.

**F- PKS (H. ISKAN QOLBA, M.A):**

Terima kasih kepada Pak Ketua dan semua Anggota Komisi VIII dan Bapak-Bapak dari BNPB. Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan kita berharap dari Pak Ketua nanti pembahasan anggaran 2021 itu kita bahas di puncak ... saat ini fokus menanggapi anggaran 2020 ini karena saya lihat dengan terjadinya bencana Covid di Indonesia justru BNPB ini mendapatkan keberkahan rejeki banyak dapat anggaran ya kan? Jadi di balik kesusahan ada juga kesenangan yak an? Dan ini yang akan saya kritisi Pak Ketua.

Pertama yang ingin saya kritisi angka 975 miliar. Itu adalah program membangun rumah sakit di Pulau Sebaru. Tadi saya di internet Pulau Sebaru itu tidak ada penduduknya. Dia pulau kecil diantara gugus tugas Pulau Seribu, tetapi BNPB mengeluarkan 975 miliar. Saya belum tahu itu sudah dihabiskan belum. Karena kalau tujuannya terjadi Covid akan dikirim kesana. Ini aneh. Ini tidak berdasarkan studi yang benar dan juga tidak melibatkan Kemenkes karena tidak mungkin jika seseorang terpapar Covid di Jakarta ini terus harus di pinggir laut dan didatangkan pesawat ini aneh menurut saya. Ini Pak Ketua saya berharap kita harus mengunjungi tempat ini. Setiap anggaran negara bukan hanya terserap atau tidak tetapi outcomenya apa benar anggaran negara itu benar-benar dimanfaatkan. Kalau dia dibangun disitu 975 miliar dia tidak ada makhluk, terpencil, transportasi, jangankan manusia hewan pun tidak ada disitu. Hanya ada alat-alat Kemenhan untuk mengawal pulau-pulau itu.

Jadi itu Pak Ketua ini perlu kita selidiki sebagai tugas pengawasan saya Iskan dari PKS ini perlu ditinjau ke sana seperti apa disana. Karena saya lihat di internet ada salah satu ormas juga disana mengusulkan, kemudian ada pengusaha ... saya baca di internet itu ya. Saya lihat ... disana berapa sebetulnya tidak ada datanya sama sekali. Maka di zaman internet sekarang tidak ada data tentang rumah sakit Sebaru ini tetapi anggaran sudah turun 975 miliar. Jadi menurut saya serius ini Pak Ketua, saya mengusuli 10 miliar saja untuk Dapil susah benar itu. Kalau ada di pinggir laut pantainya sangat sulit sekali kita memberikan ke BNPB ini. Ini Pak Sekjen ini perlunya efisiensi

juga supaya hal-hal ini dibicarakan kepada kita tiba-tiba ada ormas ada pengusaha tiba-tiba ini jadi ini Pak. Tolong dicatat angka 975.

Terus yang kedua anggaran yang didapatkan tahun ini sekitar 8 triliun ada sekitar sisa 3,97 triliun. Ini waktunya yang efektif coba September, Oktober, November yang Desember sudah enggak efektif lagi. Ini Pak Ketua saya usulkan supaya ini kita analisa lagi yang sisa ini apa yang belum disalurkan. Kalau bisa komisi VIII juga memberikan semacam program lah untuk Dapil apa yang umapamanya yang bisa lebih cepat tetapi untuk membantu kesulitan-kesulitan di masyarakat. Bahkan kalau kita lihat rumah sakit enggak punya masker 95 di daerah itu enggak ada. Padahal itu syarat utama supaya dokter bisa selamat. Jangan kita hanya ngomong dokter insya allah selamat bukan begitu caranya negara. ...Negara itu tugasnya melindungi tumpah darah. Jadi saya mengusulkan Pimpinan angka 3.97 triliun tadi perlu Pimpinan yang mendalaminya ... dan apa yang bisa membantu BNPB untuk mempercepat realisasinya termasuk dengan teman-teman DPR yang di daerah banyak yang jagolah ada yang dua kali tiga kali. Jadi sangat bisa itu Pak. Jadi tolong diperhatikan ... karena angka tersebut biar jelas Ketua.

Yang ketiga sebetulnya saya sekarang di Banggar ya. Kemarin di Banggar itu akan ada anggaran 25 triliun untuk penyiapan vaksin. Saya minta BNPB untuk mempersiapkan konsepnya. Yang 25 triliun itu akan dipakai sebanyak 160 juta rakyat Indonesia itu harus dibuat consensus biar enggak rebut nanti siapa yang didahulukan siapa yang harus pertama itu harus didahulukan supaya ada konsep keadilan. Sebetulnya mungkin ya mungkin kalau secara 160 juta ... berarti ada 100 juta lagi yang dipakai dengan biaya sendiri. Nah ini harus berdasar. Karena memang Januari atau Maret sudah harus dilaksanakan BNPB ini masih dianggap apa untuk bencana Covid ... BNPB harus ... seperti apa. Ini sengaja saya ributkan karena mungkin datanya belum sampai ya. Ini 25 T untuk maksudnya vaksin.

Terus yang terakhir saya minta itu ada 2,28 triliun ada itu bentuknya apa pinjaman apa hibah? Kalau dia pinjaman itu berartikan yang berhak meminjam itu Kementerian Keuangan ini yang harus kita tahu tetapi Komisi VIII enggak tahu. Apakah ini bentuknya hibah, kalau bentuknya hibah itu tetap dipertanggungjawabkan juga ke Komisi VIII karena dalam UU semua yang merupakan penerimaan negara bukan hanya APBN DPR itu juga berhak untuk mengawasinya. Itu Pak Ketua yang saya ingin sampaikan angka 975, 2,28, 3,9 dan 2,5 triliun.

Dan terakhir sebelum saya tutup saya minta anggaran yang ada juga di Bank Dunia yang 2,28 itu jelaskan bentuknya apa angkanya? Pinjaman atau hibah? Kalau hibah mohon dijelaskan kemana saja. Begitu saja Pak Ketua saya agak banyak membahas anggaran karena saya banyak angka mendadak di BNPB jangan BNPB .... Menurut saya harus ... karena banyak keluhan dari kementerian lain itu mereka merasa tidak dilibatkan pembelian alat kesehatan itu mereka menganggap bahwa itu adalah Tupoksinya

Kemenkes yang belanjanya adalah BNPB. Ini adalah sebenarnya adalah rebutan apa ya rebutan lahan. Jadi dengan adanya rebutan lahan ini penanganan Covid tidak bagus di negara kita ini yang kita keluhkan ini Pak Ketua bagaimana caranya ini. Itu saya berharap Pak Ketua yang akan mensinergikan ini ... Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya Iskan Qolba Lubis dari Fraksi PKS, Sumut II yang banyak bencana tapi kurang mendapatkan perhatian.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Iskan. Susah Pak Samsu Niang sinyalnya enggak ada. Silakan Meja Pimpinan.

**F- PDIP (Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd.):**

Pak Samsu Niang Pak Ketua. Izin, enggak kedengaran?

**KETUA RAPAT:**

Putus-putus, meja pimpinan dulu ya.

**F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Setiap hari tingkat positif rate yang semakin tinggi. Misalnya kemarin kita tiba-tiba dikagetkan ya sebetulnya Nggak kaget pikir masyarakat jadi ah 3.000 ya? Ya udah deh padahal itu 3000 itu sesuatu yang kalau saya melihatnya wow gitu kok bisa begini ya kita ya? Terus terang aja kami saja di DPR sekarang ini Komisi VIII Bapak Kepala ya was-was juga ini. Was-was apalagi sentral ac-nya sentral kayak begini. Yang membuat kita semua menjadi was-was itu. Tetapi kecenderungannya kita lihat praktek yang di lapangan sekarang ini new normal atau adaptasi baru kok jadi seperti normal?

Oleh karena itu melihat situasi seperti ini tentu kita memang ya kami Komisi VIII juga tak henti-hentinya Pak untuk mendorong supaya bagaimana kita bisa sama-sama mendisiplinkan diri memakai masker, mendorong masyarakat. Dan kami di Dapil pun juga selalu bicara soal bagaimana kita mematuhi protokol Covid-19. Nah Tapi tentu ini harus dikembalikan kepada kita sendiri terutama saya kira soal keteladanan yang ditunjukkan oleh semua kalangan, semua pihak. Tadi para anggota telah banyak bicara soal bagaimana melibatkan tokoh agama, bagaimana melibatkan berbagai pihak agar apa yang kampanyekan oleh kita semua untuk penanganan Covid-19 ini mitigasinya atau pencegahannya jauh lebih penting daripada penanganan kesehatan. Nah oleh karena itu ya kita juga menjadi, pasti penjelasannya Pak Kepala juga kami tak henti-henti dan tak bosan-bosan kan Pak ya? Untuk mengingatkan masyarakat.

Nah masalahnya adalah apakah itu mungkin bisa dilakukan? Jika misalnya -ya mohon maaf ya- sampai saat ini kita masih belum punya protokol menghadapi Pilkada. Saya tidak tahu pasti udah punya tapi ini tapi

perlu punya tentang protokol tentang menghadapi Pilkada gitu. Saya berharap itu sudah ada gitu ya. Karena mau tidak mau Pak kadang-kadang kalau sudah terjadi persaingan politik apapun bisa dilakukan Pak biasanya kalau di daerah. Itu yang harus diantisipasi sedemikian rupa Pak. Saya kira Pak Kepala sering diundang juga kami tahu oleh Komisi II dan menjadi referensi ya untuk apakah dan bagaimana protokol Covid-19 itu bisa di laksanakan dalam konteks menghadapi Pilkada itu?

Pertama itu, yang kedua saya sudah kita beberapa kali rapat dan selalu menyampaikan soal rate population test yang memang sekarang relatif sudah semakin tinggi begitu ya Pak ya? Dan masyarakat saya kira juga sudah punya kesadaran yang tinggi secara mandiri untuk melakukan tes. Walaupun kami juga tahu bahwa ada berbagai pihak juga mohon maaf yang memanfaatkan tes Covid ini itu ya untuk kepentingan-kepentingan bisnis. Ya kita tahulah nggak ada yang harganya swab tes itu sekian juta dengan penyelesaian sekian jam, dua hari, tiga hari begitu. Nah saya tidak tahu bagaimana pengaturan soal itu? Apakah ada standar yang telah ditetapkan oleh Satgas sendiri tentang prosedur-prosedur uji tes tersebut? Supaya masyarakat jangan sampai apa namanya merasa di satu sisi dengar ini gratis tetapi di sisi lain ada juga yang harus bayar sampai 2 juta misalnya. Ya kalau itu dilakukan oleh swasta ya ya ya kita tapi mesti ada standar yang mengatur itu begitu. Ada juga Pak Ali bilang 4,5 juta. Oleh karena itu Pak menurut saya ini harus di selesaikan prosedurnya begitu. Supaya apa? Supaya betul-betul masyarakat merasa terlayani ke tempat pertama soal apa namanya jenis layanan Swabnya seperti apa? Waktunya berapa? Standar biayanya berapa? Nah itu menurut saya harus ada.

Apalagi sekarang mendengar rapid tes sudah nggak bisa dipakai lagi. Sekarang semua harus menggunakan reagen, PCR dan lain-lain. Jadi apa namanya jadi polemik juga di masyarakat begitu akhirnya jangan sampai membuat masyarakat menjadi frustrasi terhadap tes tersebut. Oleh karena itu Pak Kepala ya, boleh kita sekarang ini turut berbangga soal kesembuhan kita 72% itu. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa kematian kita masih di atas rata-rata dunia. Berartikan masih ada yang perlu kita benahi dari soal penanganan kesehatannya ya?

Yang ketiga Pak kebetulan kami sudah mendapatkan Supres (Surat Presiden) soal RUU Penanggulangan Bencana. Yang kami kaget Pak Kepala penyebutan nama BNPB di dalam DIM versi Pemerintah Pak ditiadakan. Jadi ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang menyebutkan kata BNPB. Kalau ini, nama BNPB itu tidak secara eksplisit padahal tujuan kita ini disebabkan, ini karena Supres yang kami terima Pak BNPB tidak dilibatkan sebagai wakil dari Pemerintah. Perlu saya sebut ya Pakya? Ini saya buka aja nggak apa-apa ya Pak. Saya sebutkan ini suratnya yang nanti wakil dari Ppemerintah itu adalah Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menpan RB, Menteri Kesehatan, serta Menkumham. Saya tadinya pengen sekali BNPB yang punya pengalaman penanganan bencana itu

dilibatkan di dalam mitra nanti kalau kita bikin Panja dan Pak Ihsan kemarin sudah hadir dalam Rapat Bamus Insyaallah akan diserahkan kepada Komisi VIII untuk pembahasannya. Nah pertanyaan saya ya saya kadang-kadang kasihan juga sama Pak Kepala ini. Kok, seharusnya kita ingin justru DPR melalui DIM yang kita punya memperkuat peran BNPB tetapi versi DIM pemerintah sendiri penyebutan nama BNPB dihapus. Saya tidak tahu mungkin saya harus perdalam ini nanti dengan wakil dari Pemerintah kita nanti Panja.

Tetapi buat saya, saya prihatin saya baca sekilas dari DIM versi Pemerintah. DPR punya Komisi VIII yang sangat tinggi apalagi di tengah pandemi Covid-19 untuk memperkuat BNPB dan kita ingin bahwa masyarakat sistem regulasi kita kuat untuk proses penanggulangan bencana. Nah ini kok bisa begini? Oleh karena itu Bapak kepala karena rencananya kami mau selesaikan target kami pengen selesai tahun ini. Kalau tahun ini bisa. Kalau masa sidang ini kami juga harus apa namanya. Karena saya tahu kalau Pak Kepala BNPB luar biasa kerjanya dan perlu diperkuat misalnya dengan pelibatan TNI/Polri secara eksplisit di dalam undang-undang yang kita akan revisi, soal dukungan anggaran yang sangat kuat, yang kita memang menyebutkan budgetary mandate dan terhadap penanggulangan bencana kita termasuk misalnya kita ingin memperkuat mitigasi yang diperbanyak anggarannya walaupun itu nanti tidak semuanya di BNPB. Oleh karena itu Pak kami tentu ingin sekali ya saya tidak tahu sejauh mana BNPB dilibatkan didalam proses penyusunan DIM versi Pemerintah. Ini penting. Masalahnya apa? Kami ini berdebat lagi saya saja sama Pak Bukhari berdebat lagi soal rancangan punya DPR karena kami ingin memperkuat itu kami ingin memperkuat BNPB karena BNPB ini luar biasa perannya dalam konteks penanggulangan bencana kita. Nah ini ada apa gitu? Mungkin nanti pak Kepala BNPB dan timnya gak akan masuk di dalam Panja Pak karena tidak disebutkan disini di dalam Supres gimana coba mau bahas apa kalau misalnya BNPB tidak dilibatkan dalam tim pembahasan Panja.

Jadi ini saya mengingatkan kita karena Bapak yang nanti akan menjadi user. Demikian terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Doni ini penting Pak karena ruhnya UU Kebencanaan ini di BNPB sebenarnya Pak dan BNPB ini Raker berarti setingkat menteri. Tapi memang dalam Tata Cara Pembuatan Undang-Undang itu disebut menteri itu disebut sebagai leadnya. Nah mungkin Mensos dan Menkumham. Itu penting Pak jangan sampai nama BNPB hilang. Baik Pak Ihsan.

#### **F- PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, B.A., B.Comm., M.E.Con):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.



**Yang saya hormati pimpinan Komisi VIII.**

**Yang saya hormati Anggota Komisi VIII baik yang ada secara fisik maupun virtual.**

**Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Doni Monardo beserta jajaran dan juga Pak Sekjen, Pak Armen.**

Pertama-tama tentu kami mengucapkan apresiasi karena saya secara pribadi melihat ini penanganan pandemi Covid-19. Kalau olahraga itu bukan sprint Pak tapi maraton dan saya lihat daya tahan Bapak Ibu semua yang ada di depan saya ini luar biasa sekali. Saya kasih *applause* yang luar biasa untuk Bapak Ibu sudah beberapa bulan tetap dia tetap bekerja keras itu. Tapi walaupun begitu tetap pasti kita akan melaksanakan fungsi *monitoring* kita.

Kami juga menghargai adanya penurunan kasus aktif di bawah rata-rata dunia sudah 23%, di dunia masih 27 kurang lebih dan tingkat kesembuhan juga sudah naik 72%. Tapi memang tadi betul dikatakan Pak Ace kita masih harus kerja keras lagi karena tingkat kematian masih agak lebih sedikit dari rata-rata dunia. Saya rasa Bapak/Ibu kawan-kawan semua yang ada di BNPB tahu persis permasalahannya seperti apa sekarang. Artinya *learning by doing* itu Pak Doni sudah harus tahu di mana harus kencang di mana harus pelan di mana harus apa namanya bagi ini dimana harus bagi itu. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa jadi dibukukan gitu Pak Doni, Pak Armen agar bisa jadi pengetahuan baru untuk kita semua. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan jangan sampai pengalaman yang luar biasa kaya ini, yang luar biasa berharga hilang begitu saja. Kalau saya boleh *voting* sih -dan mudah-mudahan tidak terjadi- pertama pandemi selesai dalam waktu dekat covid-19 dan kalau misalnya pun sampai ada lagi -dan kita jangan sampai terjadi gitu ya- saya masih tetap jadi Kepala BNPB dan Sestamanya BNPB. Tapi jangan amin berarti mau ada lagi tapi kita melihat sudah cukup baik.

Namun memang masih banyak yang perlu kita perbaiki dan kita maksimalkan. Contoh misalnya kita melihat tadi masalah serapan anggaran Pak. Serapan anggaran BNPB dari dana DSP-nya terutama itu masih sangat kecil 50%. Padahal pak presiden sudah terus kepada seluruh KL kementerian dan lembaga non kementerian untuk cepat menyerap di sini kita melihat masih ada sekitar 4 triliun yang belum terserap. Padahal Pak Doni ini teman-teman di bawah keluhanya pasti banyak sekali. Contoh misalnya tadi Pak Ali mengatakan permasalahan lab PCR di Sampang, yang di Sumenep sorry Sumenep. Saya rasa ini terjadi hampir di seluruh provinsi Pak. Artinya sudah ada labnya. Saya tidak tahu terakhir sudah berapa banyak Bapak distribusikan kalau nggak salah bulan Oktober itu Bapak bilang dari 1 lab menjadi 200 lab tapi itu udah lama. Mudah-mudahan sudah bertambah tapi masalah penyebarannya masih agak belum adil gitu ya.

Contoh misalnya di Jambi saya dapat laporan mesin PCR itu ada dua dan dua-duanya di Kota Jambi. Kita bisa bayangkan kalau misalnya saudara-saudara kita yang ada di Kerinci cukup jauh sekitar 12 jam itu mau tes swab

pasti kalau dia buat di Kerinci terus jalan. Ada dua pilihan mereka datang ke Kota Jambi memakan waktu dan bisa menyebarkan ke yang lain atau mereka tes di sana dibawa ke Kota Jambi itu pun punya resiko. Apakah nanti hasilnya tidak apa akurat dan seterusnya-seterusnya. Artinya memang tolong diperhatikan masalah ketimpangan ini Pak harus ditaruh kalau misalnya saya saya tahu itu hanya Jambi. Jadi satu di timur satu di barat supaya bisa lebih efektif lebih efisien. Kalau Jambi memang belum terlalu banyak Pak kelihatannya. Tapi saya yakin ini sudah banyak sekali yang terkena sebetulnya. Apalagi di daerah-daerah yang memang agak susah infrastrukturnya. Jadi tolong Mohon diperhatikan masalah pengadaan mesin PCR karena memang itu salah satu tracing tadi Bapak bilang tiga puluh ribu perhari bukan hal yang muda jadi dipercepat apalagi anggaran masih ada sekitar 4 triliun nanti mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa masih ada sebesar itu.

Kemudian juga ada keluhan Pak Doni dari teman-teman di rumah sakit memang saya dengar seperti Wisma Atlet itu mau dibangun tambahannya. Maksudnya dilengkapin tower-tower yang berikutnya karena memang sudah tidak memadai lagi. Tapi utang kita yang lama untuk yang awal itu masih belum terselesaikan Pak. Belum terselesaikan. Jadi masih banyak peralatan masih banyak obat-obatan nakes itu belum selesai ya. Jadi ini yang saya juga bingung padahal DSP-nya masih cukup banyak kenapa tidak secepat yang disalurkan? Kalau masalahnya ada di pemeriksaan BPKP, maka ya kita kalau perlu kita panggil BPKP-nya Pak Ketua supaya cepat gitu ya. Kita paham dan mengerti bahwa kita harus tetap hati-hati dalam melakukan apa atau mengadakan barang. Tapi kita berpacu dengan waktu dan itu tidak bisa menjadi alasan.

Kemudian juga Dana Siap Pakai Pak. Dana Siap Pakai biasanya setiap tahun kalau saya melihat -walaupun saya baru di Komisi VIII- itu kan ada program-program yang rutin dalam artian tidak kita harapkan tapi yang namanya bencana karena Indonesia ini memang Pak Doni juga sempat bilang seperti supermarket ya. Mau gempa ada mau kebakaran hutan ada mau banjir ada dan itu rutin setiap tahun. Biasanya ada anggaran untuk penanganan bencana dan DSP untuk RR itu Pak. Nah itu kan tahun ini hampir praktis tidak ada, itu kemudian seperti apa Pak Doni apa menyikapinya? Yang RR sangat berkurang jauh gitu ya. Apakah memang tidak perlu atau memang ada yang urgent sehingga ditinggalkan atau seperti apa gitu? Saya hanya melihat dari sisi anggarannya saja.

Yang terakhir saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Iskan juga tadi masalah minta diperjelas sedikit masalah *project IDPRIP (Indonesia Disaster Resilience Inisiatif Project)*. Apakah ini hibah? Apakah pinjaman seperti apa dilakukan konsepnya seperti apa imbasnya seperti apa dengan anggaran kita dan dengan *mainpower* yang Bapak punya, apakah masih memungkinkan untuk tetap dijalankan? Itu yang ingin saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Jenderal Bapak Laksamana Madya? Ya mau tanya Pak enggak? Ya silakan.

**F- PARTAI GERINDRA (LAKSAMANA MADYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan Komisi VIII dan rekan-rekan sekalian.  
Bapak Doni Monardo yang kami hormati beserta staf.**

Ada tiga yang kami tanyakan Pak. Yang pertama adalah Bapak minta kenaikan anggaran sekitar 98 miliar. Di sisi lain tahun ini, pertanggung jawaban Bapak itu masih banyak yang di bawah 50% Pak. Sehingga kami mirip dengan bapak yang di sini tadi apa alasan bahwa untuk minta anggaran ini minta tambahan ini?

Yang kedua di penyaluran Dana Siap Pakai di halaman 19. Bapak di situ mencantumkan antara Mabes TNI. Apakah sudah sesuai dengan aturan? Karena kita punya namanya OMSP operasi militer selain perang, apakah ini sudah masuk? Kalau jawabannya iya sudah sesuai syarat di sini ada yang Bapak masukkan di Mabes TNI tapi juga bapak masukkan BNPB. Saya beri contoh Bapak mengatakan penggunaan dan ini antara lain itu operasional pertama penanganan bersama non alam itu sekian. Tapi di sini juga ada kalimat-kalimat yang mirip dengan itu. Misalnya bahwa Bapak juga ada penanganan yang untuk virus Bapak kenapa kok dipilah? Kenapa nggak dimasukkan kalau itu memang di Om msp bapak bisa pilih masuk ke Mabes TNI semuanya atau di tempat bapak di nomor dua BNPB?

Yang kedua seingat saya penggunaan kapal perang atau pesawat udara itu banyak hal-hal yang perlu diperhitungkan di situ. Misalnya apakah Bapak menggunakan bahan bakar? Apakah bangunan uang lauk pauk dan sebagainya? Apakah ini juga sudah masuk di situ Pak? Karena item aja ini perlu saya ingin mendengar apakah BPK menerima dengan catatan Bapak ini? Yang pertama. Yang kedua di nomor 9 Pak untuk kepentingan Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur kenapa Jawa Timur Pak pada kita punya 34 provinsi? Di bawahnya Universitas Airlangga apakah hanya Airlangga yang melakukan kegiatan untuk kepentingan Covid Pak? Itu Penyaluran Dana Siap Pakai Pak.

Yang terakhir yang ketiga Pak mengatakan bahwa sekarang pendekatan untuk penanganan Covid selain yang sudah dilakukan Bapak ingin mengadakan perubahan-perubahan yang ada di antaranya tadi cerita di ruang tunggu tadi yaitu mengenai perilaku. Ada kerawanan Pak atau ada sesuatu yang sulit yang sudah kadung tertanam di otak kita Pak. Sebagai contoh orang masuk masjid fikirannya adalah tatkala salat rapatkan barisan,

luruskan shaf. Ini sering diucapkan dan masih akan menjadi Pak kadang lupa mengatakan jaga jaraknya tapi suruh merapatkan bahkan yang sudah hijau diabaikan yang begini Pak.

Yang kedua ada kalimat kiamat ke kalau kita ketemu Kyai silaturahmi antar mencium tangan. Sementara untuk kaitan dengan pandangan Covid di tidak diperbolehkan Pak. Makna yang lain adalah makan gak makan kalau kumpul Pak. Ini budaya-budaya yang menurut Bapak tadi ingin bapak selipkan dalam penanganan Covid bagaimana teknis pelaksanaannya Pak? karena ini tidak mudah tidak mudah sekali lagi. Karena kami punya madrasah punya masjid perilaku semacam ini tidak mudah Pak. Oleh karenanya tadi dikatakan oleh teman-teman yang tadi menyampaikan juga harus dilewatkan para pemuka agama tokoh, masyarakat, dan sebagainya. Tiga hal ini saja Pak terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Laksamana Madya Moekhlas Sidik Gerindra. Itu Pak Kepala BNPB Pak Doni Monardo pertanyaan saran masukan ya kan harapan dari para anggota dari meja pimpinan termasuk dari yang virtual. Saya kira hampir mirip semua Pak jadi Pak Doni Silakan menjawab secara global dan menyeluruh aja Pak. Enggak perlu satu persatu Pak karena sama-sama kita Insya Allah mengambil kesimpulan dan Intinya kita kan di RKA K/L nya Pak. Kalau isu-isu aktual masih bisa kita perbincangkan terutama untuk menunjang Undang-Undang Kebencanaan yang Surpresnya sudah kita terima. Akan kita bahas mungkin mulai minggu depan ya Pak Armen. Silakan Pak Doni. Perpanjangan ya? Perpanjang waktu sampai jam 13.30 ya.

#### **(RAPAT: DISETUJUI)**

Silakan Pak Doni.

#### **KEPALA BNPB (LETJEN DONI MONARDO):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan bapak wakil ketua Komisi VIII DPR RI serta seluruh anggota Komisi VIII sekalian yang kami muliakan.

Saya bersama dengan sestama dan irtama beserta para pejabat sekalian yang kami sekarang sebagai unsur dari gugus tugas dan sekarang Satgas. Tadi sudah banyak yang memberikan masukan kepada saya terkait dengan sejumlah pertanyaan, kemudian juga usulan dan juga masukan-masukan kami terima dengan senang hati dengan apresiasi yang tinggi begitu besarnya perhatian Komisi VIII kepada BNPB.

Yang pertama tentang Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bapak Pimpinan, sebagaimana yang selalu kami sampaikan bahwa negara

kita ini adalah negara dengan risiko bencana termasuk yang tertinggi di dunia setiap tahun pasti Kami lagi pasti terjadi kebakaran hutan dan lahan karena kekeringan terutama di lahan gambut. Yang kedua setiap tahun pasti terjadi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Dan korban jiwa dalam periode 2018-2019-2020 ini mencapai ribuan orang. Terutama pada tahun 2018 kejadian yang terjadi di NTB gempa bumi. Kemudian di Sulawesi Tengah gempa bumi, likuifaksi, dan juga tsunami serta bencana yang terjadi di Selat Sunda longsornya anak Gunung Krakatau. Termasuk juga tahun 2019 pada awal tahun kita dihentakkan dengan kasus banjir, banjir bandang yang terjadi di Sulawesi Selatan. Sangat jarang terjadi banjir sebesar itu di Sulawesi Selatan karena terakhir kalau tidak salah pada tahun 1980-an awal dan itupun korbannya tidak perlu banyak. Tetapi kemarin pada tanggal 22 Januari tahun 2019 itu korban mendekati 100 orang. Termasuk juga di Sentani yang korbannya mencapai lebih dari 100 jiwa. Kemudian Konawe, Konawe Utara dan di beberapa tempat lain. Kemudian gunung berapi juga yang sangat aktif yaitu Gunung Merapi belum lagi Sinabung yang sampai sekarang belum bisa kita pastikan kapan akan berakhir. Masih ada selalu.

Nah ini semuanya tentunya mau harus mau harus membuat kita menyusun sebuah konsep yang lebih optimal dalam rangka penanganan bencana baik upaya pencegahannya, mitigasinya, pengurangan resiko bencana termasuk instrumen yang mengelola kebencanaan. Dan kami bersyukur Komisi VIII telah memberikan sebuah dorongan untuk melakukan revisi dalam rangka memperkuat Undang-Undang Kebencanaan sendiri.

Dan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan, Wakil Ketua Komisi VIII Pak Ace terkait dengan masalah usulan mungkin di sini adalah sebuah kata-kata mungkin kalimat yang menurut saya apa namanya tidak mengurangi esensi dari penanggulangan bencana. Kenapa Pemerintah telah memasukkan masalah kebencanaan sebagai program prioritas nasional? Namun demikian kami nanti untuk berdiskusi lagi apakah ada hal-hal yang justru mungkin mengurangi kekuatan dan kesiapsiagaan dari hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Kemudian yang kedua terkait dengan harapan dari Bapak Ibu sekalian tentang program mitigasi. Sejauh ini BNPB selalu hadir ketika bencana telah terjadi dan kami belum diikutsertakan secara total dalam upaya mitigasi terutama dalam periode pencegahan karena ini semuanya berada di kementerian/lembaga. Namun pada bulan Januari yang lalu telah ada rapat bersama dengan tiga provinsi yaitu DKI, kemudian Banten, dan Jawa Barat terkait dengan sejumlah daerah yang secara rutin pasti menimbulkan banjir seperti akibat dari meluapnya Sungai Cisadane yang dampaknya kepada wilayah Jakarta sementara hulunya terbagi dalam beberapa daerah. Kemudian juga Ciliwung yang pada awal tahun 2020 terjadi banjir dan mengakibatkan korban yang juga cukup besar. Tanggal 1 Januari 2020. Kemudian diikuti lagi dengan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat.

Termasuk juga Citarum yang setiap tahun selalu terjadi banjir di daerah tertentu terutama di kawasan cekungan Bandung yaitu Baleendah.

Para pimpinan dari seluruh provinsi sepakat apabila daerah-daerah ini secara menyeluruh terjadi banjir yang mengakibatkan daerah lain terganggu maka diharapkan BNPB bisa terlibat. Ini yang kami harapkan bahwa kita seharusnya tidak hanya berpikir masalah penanganan setelah terjadi tetapi bagaimana upaya mitigasinya bagaimana upaya pencegahan. Karena kalau kita perhatikan Bapak Pimpinan daerah-daerah yang merupakan kawasan penyangga ini telah terjadi alih fungsi lahan yang sangat masif di kawasan Puncak di cekungan Bandung. Sejumlah kawasan telah mengakibatkan yang tadinya daerah hutan berubah menjadi kawasan pertanian semusim, yang tadinya tanaman-tanaman keras termasuk pohon kina di wilayah Kabupaten Bandung sekarang berubah menjadi Kebon Kentang berubah menjadi wortel dan sayuran lain. Padahal logo dari Kabupaten Bandung Bapak Pimpinan adalah pohon kina. Nah Kami sekarang kamu lihat tidak ada lagi pohon kina di sana . Padahal sekarang ini ya kita tadi Bapak semua sudah memberikan masukan kepada kami pohon kina termasuk salah satu bahan baku untuk apa namanya obat malaria dan mungkin juga ke depan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Covid begitu. Sehingga upaya mitigasi tentunya harus menjadi sebuah konstruksi yang utuh melibatkan seluruh kementerian/lembaga di mana BNPB bisa ikut terlibat secara langsung. Tetapi sejauh ini anggaran untuk mitigasi belum ada mudah-mudahan lewat sejumlah pertemuan-pertemuan bisa apa namanya dipastikan bahwa ada kesiapan dana dalam program mitigasi.

Kemudian selanjutnya yang ketiga kami bicara tentang masalah Covid Bapak Pimpinan kehadiran dari tokoh masyarakat memang menjadi hal yang sangat penting. Di tiap daerah kami merasakan bahwa apabila tokoh-tokoh agama yang berbicara masyarakat lebih banyak juga yang patuh. Dan kami juga sudah berusaha mengundang sejumlah tokoh-tokoh agama untuk bisa berkunjung ke BNPB – berdiskusi- kemudian mereka akhirnya menjadi bagian dari kampanye untuk perubahan perilaku. Kemudian kerjasama dengan MUI sudah ada Bapak Pimpinan udah ada MoU dan kami juga sudah menyiapkan sebuah program kerjasama dengan MUI sehingga diharapkan MUI bisa bersama-sama dengan Satgas daerah untuk melakukan sosialisasi secara efektif dalam program pencegahan perubahan perilaku. Karena, tidak mungkin Pemerintah sendirian bekerja dalam hal ini. Dan kita sangat menyadari bahwa kolaborasi pentahelix adalah salah satu solusi yang terbaik buat bangsa kita.

Kalau kita hanya mengandalkan masalah kesehatan dokter kita kurang 200, dokter ahli kita spesialisnya kurang dari 36.000, dokter paru kita juga kurang dari 2.000. Jadi ketika kita kehilangan dokter maka kita telah kehilangan aset bangsa yang sangat besar, apalagi seperti dokter baru 1 orang dokter paru kurang dari 2 ribu penduduk kita 270.000.000 artinya kehilangan 1 orang dokter paru berarti kehilangan pelayanan untuk 135.000

warga negara kita. Dan rasa-rasanya juga akan sangat sulit bagi kita untuk bisa mencetak dokter dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Nggak mungkin seorang dokter dikarbit dalam waktu yang sangat apa namanya singkat dengan waktu ya waktu hanya 2-3 tahun tidak mungkin. Jadi sekali lagi dokter harus kita lindungi, dokter kita selamatkan. Makanya tadi kami laporkan bahwa program prioritas kami bersama dan Kementerian Kesehatan dan perlindungan tenaga kesehatan.

Kemudian terkait dengan masalah anggaran untuk Covid Bapak Pimpinan dana siap pakai yang telah disalurkan ini mayoritas adalah kepada Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena pada saat terjadinya pandemi itu tidak ada anggaran di Kemenkes. Dan satu-satunya lembaga yang bisa mendapatkan dana dalam waktu singkat hanya BNPB yang berhak untuk mengusulkan. Makanya anggaran yang terlihat besar ini sebagian besar itu dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan. Nah adapun yang tidak bisa dikelola oleh Kementerian Kesehatan itulah yang baru dilakukan oleh BNPB. Contoh misalnya pengadaan mesin karena di Kemenkes sendiri tidak ada PPK yang membawahi pengadaan mesin PCR, termasuk juga pengadaan reagen. Jadi di luar itu hanya masker saja yang menjadi kewenangan BNPB untuk membelanjakan dana siap pakai. Jadi hanya mesin PCR kemudian *reagen* sedangkan rapid test sendiri Bapak Pimpinan rapid test antibodi kami tidak pernah membelanjakan rapid test. Adapun yang kami terima dengan jumlah jutaan unit itu seluruhnya dalam bentuk bantuan dari pihak swasta termasuk juga bantuan dari beberapa lembaga asing yang ada di Indonesia.

Kemudian adapun belanja dari BNPB untuk rapid test antigen swab sejumlah 250.000 unit itu kita prioritaskan untuk daerah-daerah yang tidak ada mesin PCR dalam rangka melakukan skrining untuk WNI kita yang kembali dari luar negeri. Sudah lebih dari 160.000 warga negara kita yang pulang karena kehilangan pekerjaan dan daerah-daerah itu tidak semuanya punya mesin PCR. Jadi kami memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang tidak ada mesin. Supaya kita mampu melakukan skrining lebih lebih cepat dan berbeda dengan rapid test antibodi, rapid test antigen Swab ini tingkat akurasi cukup bagus yaitu sekitar 70% dan ini sudah kita buktikan. Beberapa tamu yang datang ke Satgas kami lakukan pemeriksaan ternyata positif kemudian dikonfirmasi juga dengan Swab/PCR sama nilainya sama hasilnya.

Kemudian anggaran yang belum terserap ini Bapak Pimpinan mudah-mudahan tidak terlalu lama karena masih dalam proses dan sebagian dalam apa namanya penyaluran. Kemudian ada beberapa anggaran yang belum bisa kami distribusikan terutama dalam hal kegiatan pembelian barang. Kemudian pembangunan rumah sakit Wisma Atlet yang sampai sekarang masih tertahan. Kami sudah sampaikan kepada BPKP untuk mempercepat proses *reviewnya*, walaupun kami sendiri sudah menyalurkan 50% dari anggaran yang diusulkan. Mudah-mudahan dalam waktu berapa hari ini bisa kami tuntaskan. Kunci cuma satu saja, BPKP. Setelah BPKP menyetujui

semua usulan tersebut berarti ya 100% bisa disalurkan. Namun demikian kami minta kepada staf dan tim yang bekerja untuk menambah lagi anggaran yang diusulkan oleh apa namanya RMP supaya mereka bisa mempercepat atau menambah kapasitas Rumah Sakit Wisma Atlet.

Kemudian menyangkut masalah anggaran lagi Bapak Pimpinan. 2,9 triliun yang masih tersisa tersebut kami akan optimalkan untuk bisa terdistribusi sebagaimana yang sudah direncanakan bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Dirjen Anggaran. Kemudian untuk Mabes TNI dana yang tersalurkan ini merupakan usulan dari Markas Besar TNI yang kaitanya dengan operasional yang tidak masuk dalam anggaran Mabes TNI. Karena dari awal Bapak, Bapak Wakil Ketua, keterlibatan TNI betul-betul luar biasa. Tanpa bantuan Tentara Nasional Indonesia kita tidak akan mungkin dengan mudah memulangkan warga negara kita dari Wuhan. Jadi seluruh yang terlibat itu mayoritas adalah unsur TNI termasuk dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian menyiapkan tempat di Kepulauan Natuna hanya dalam hitungan jam. Bapak presiden memerintahkan sesegera mungkin kurang dari 3 kali 24 jam sejak bapak presiden memutuskan warga negara kita dari Wuhan telah bisa kita karantina di Pulau Natuna.

Nah sementara itu yang di Pulau Sebaru staf melaporkan pada saya anggaran yang dikeluarkan Pulau Sebaru yang usulannya itu semuanya dari Kementerian Kesehatan itu hanya Rp.600.000.000 saja. Jadi kami ulangi 600 juta saja untuk kepentingan Pulau Sebaru dan itu dalam rangka melakukan karantina untuk pekerja-pekerja kita yang berada di kapal, ABK Diamond Princess dan The World Dream itu seluruhnya. Karena Pulau Sebaru itu dulu pernah dipakai untuk kepentingan narkoba lantas tidak ada lagi tempat lain yang layak waktu itu yang relatif dekat dengan Jakarta dan kita tidak mau ambil resiko kalau mereka dirawat di Wisma Atlet akhirnya ditampung lah di Sebaru. Jadi tidak terlalu banyak biaya yang digunakan untuk pembangunan. Tetapi lebih kepada biaya operasional untuk penyiapan fasilitas kesehatan di Pulau Sebaru.

Kemudian hal lain yang mungkin dapat kami laporkan kepada Pimpinan terkait dengan masalah Pilkada. Kami sudah memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga kepada KPU agar pelaksanaan Pilkada ini dilakukan dengan pengerahan massa. Kalau toh itu terpaksa pun maksimal hanya 50 orang saja dan ketika ada kegiatan yang sifatnya perkumpulan atau kerumunan maka unsur-unsur pengamanan terutama unsur Polri bersama dengan Satpol PP akan membubarkan kerumunan tersebut sesuai dengan Peraturan KPU tentang Penerapan Protokol Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020. Jadi dari KPU Pimpinan, telah beberapa kali berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kami termasuk juga proses nanti pada saat pencoblosan sudah dilakukan langkah-langkah simulasi dan kami juga sudah menyampaikan bahwa rapat-rapat atau pertemuan yang sifatnya masif untuk menggunakan cara-cara yang lebih aman yaitu dengan menggunakan metode virtual.



Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah sistem pengamanan atau pemeriksaan di sejumlah bandara. Jadi memang kelihatannya sekarang jarang sekali ada petugas di lapangan karena sudah menggunakan elektronik alat kan jadi aplikasi yang telah dibangun oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan Angkasa Pura. Namun demikian setiap ada persoalan terjadi di lapangan selalu kami cek dan kami konfirmasi kembali apakah ini sesuai dengan ketentuan atau tidak. Manakala tidak kami dengan segera akan memberitahukan kepada Kepala Satgas dalam hal ini bapak gubernur bersama dengan perangkat unsur TNI Polri yang masuk dalam struktur Satgas di daerah.

Kemudian untuk *bed occupancy rate* Indonesia secara nasional memang mengalami peningkatan yang semula di bawah 40% sekarang sudah berada di angka lebih dari 40%. Ini juga berdasarkan data yang kami kutip dari rumah sakit online Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk BOR Jakarta sendiri yang tadi sempat kami sampaikan ini dalam proses untuk pengurangan pemenuhan bed di rumah sakit Covid. Bapak gubernur telah menjelaskan pentingkah periode Mei akhir, Juni ya sekitar Juni Bapak Pimpinan itu terjadi penurunan untuk DKI. Jadi kita lihat laporan harian di Jakarta kita cukup senang waktu itu sudah dibawah 300 pernah juga di bawah 200. Tetapi akhirnya itu mengalami peningkatan setelah kemarin ada apa namanya Idul Adha liburan panjang.

Kemudian untuk hal ini rumah sakit apa namanya rujukan Covid ternyata juga rumah sakit tidak mau kehilangan pendapatan Bapak Pimpinan jadi yang semula sudah disiapkan untuk rumah sakit apa namanya bed isolasi dan juga apa namanya isolasi dan ICU ini oleh pihak rumah sakit dialihkan untuk pasien dan Covid supaya ada pemasukan dari pihak apa namanya. Nah karena pasien Covidnya berkurang jumlah ruang isolasi dan peluang apa namanya isinya di kurangi juga sehingga bisa digunakan untuk pasien lain. Sekarang mengalami peningkatan bapak gubernur sudah memberikan instruksi kepada Dinas Kesehatan DKI dan kami telah melakukan pertemuan pada hari Minggu malam yang lalu ini sudah kami antisipasi dan malam ini pun kami akan melakukan pertemuan lagi dengan seluruh kepala rumah sakit Jakarta Bapak Pimpinan, bersama dengan unsur dari TNI karena TNI mengelola Rumah Sakit atlet. Sehingga beban dari rumah sakit juga tuh pelan-pelan kita bisa geser ke Rumah Sakit Atlet

Kemudian untuk laboratorium tercatat sudah sebanyak 278 laboratorium dengan jumlah mesin PCR sebanyak 320. Kelihatannya memang perlu ada kerjasama dengan swasta yang lebih menyeluruh. Karena tidak semua mesin yang dikirim ke daerah akhirnya bisa berfungsi. Jadi walaupun sudah dilatih kan petugasnya pimpinan ternyata tidak semuanya berani melakukan kegiatan pemeriksaan spesimen karena risikonya juga sangat tinggi. Demikian juga harga yang tadi Bapak sampaikan ada rumah sakit yang mematok harga tes PCR Swab sampai di atas dua setengah juta rupiah. Padahal harga rutin atau harga yang bisa kita lihat sebenarnya tidak

akan lebih dari Rp. 500.000 per unit apa per sekali pemeriksaan spesimen. Nah kami kami telah mendistribusikan jutaan reagen keseluruh daerah. Dan memang kalau dilihat 51% mereka yang sekarang mengikuti tes Swab ini adalah gratis. Itu adalah lab-lab yang dikelola oleh pemerintah Tetapi ada juga lem tertentu yang kami dapat laporan itu meminta bayaran kepada masyarakat. Kami akan bicarakan lagi dengan Bapak Menteri Kesehatan untuk melakukan penertiban. Dan kiranya juga di sini nanti bisa kita tetapkan berapa harga standar yang kiranya bisa dipatok untuk setiap pemeriksaan spesimen di seluruh Indonesia supaya harganya standar. Kita juga tidak ingin pengusaha yang sudah terlanjur membeli alat, membangun jaringan, mereka rugi tetapi juga kami tidak ingin masyarakat justru juga mengalami kerugian. Jadi kami akan melibatkan BPKB bersama-sama untuk memutuskan harga yang layak sehingga semuanya bisa berjalan dengan lebih baik.

Kemudian untuk ancaman Nubika Bapak Pimpinan. TNI kami monitor sudah merancang suatu organisasi. Dulu itu ada Detasemen Nubika (Nuklir, Biologi dan Kimia) sekarang organisasi itu apa namanya kurang begitu mendapat perhatian. Kami sudah bicarakan dengan Mabes TNI agar ke depan ancaman kita bukan hanya ancaman apa namanya alam bencana alam. Saya mohon maaf ini berseloroh Bapak Pimpinan dengan teman-teman perwira tinggi jajaran TNI yang mereka mengatakan pada saya “Bang kalau orang itu mungkin, tapi bencana pasti” Jadi artinya bencana itu udah pasti akan kita hadapi karena yang mengurus gempa bumi dan juga tsunami kalau ada kejadian pertama pasti unsur TNI dan Polri. Saya katakan supaya TNI juga bisa membantu Pemerintah dengan meningkatkan SDM sehingga program pelatihan dan pendidikan TNI sudah harus memasukkan kurikulum yang terkait dengan bencana apakah kebakaran hutan dan lahan. Karena di lapangan akhirnya bekerja adalah dari TNI AU maksimal mayoritas setelah terjadi kebakaran karena mereka yang mengendalikan helikopter. Demikian juga ketika renovasi bangunan. Kita rasakan bahwa memanfaatkan TNI terutama dari unsur-unsur seni, unsur seni kontruksi itu cepat sekali di samping terlihat dari Kementerian PUPR.

Jadi organisasi ke depan untuk BNPB pun kita harapkan memenuhi semua aspek potensi bencana yang terjadi di tanah air. Kalau selama ini kami hanya cenderung kepada ada staf dan juga pejabat yang kaitannya dengan masalah gempa kemudian penanganan gempa, banjir. Sehingga ke depan kami akan mencoba untuk merancang sebuah organisasi BNPB yang bisa menampung semua keahlian lintas lintas keahlian. Jadi ada ahli vulkanologi ada ahli di bidang tsunami -walaupun sekarang juga sudah ada- tetapi mungkin perlu kami lengkapi. Demikian juga ancaman untuk pandemi yang mana kami laporkan justru sendiri enggak punya dokter sekarang ditugaskan untuk menangani pandemi dan tidak mungkin BNPB bisa melakukan hal ini tanpa bekerja sama secara baik dengan seluruh kementerian/lembaga termasuk organisasi-organisasi kedokteran. IDI, asosiasi dokter ahli asosiasi perawat dan semuanya. Dan ibaratnya hari ini Bapak Pimpinan kantor BNPB itu menjadi kantor masyarakat Indonesia. Karena hampir semua lembaga

sekarang berada bekerja sama dengan dan ikut membantu termasuk juga dari Majelis Ulama Indonesia.

Kemudian itu dana hibah saya minta tolong nih Pak Lele yang pas . Dana hibah dari World Bank Pak IDRIP. Saya minta izin boleh berkenalan Bapak Pimpinan untuk dijelaskan oleh Deputy Pencegahan.

**KETUA RAPAT:**

Singkat aja Pak karena jam 2 kita rapat dengan Mensos. Silakan Pak.

**DIRJEN PENCEGAHAN BNPB:**

Baik mohon izin.

**Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Kepala BNPB.**

Sedikit saja kami ingin menyampaikan mengenai program IDRIP. Program IDRIP ini menjadi salah satu bagian dari program yang diberikan pada pemerintah Indonesia bersama dengan pasca gempa bumi di Lombok eh maaf Palu. Jadi ini bersamaan. Lemudian ada dua program yang satu diberikan di Palu yang satu lagi untuk peningkatan kapasitas yang ada di IDRIP sendiri. Program IDRIP sendiri Ini adalah program pinjaman program pinjaman yang durasinya 2020-2024. Dan ini ada dua pengguna yaitu BNPB dan BMKG. Programnya sendiri adalah memperkuat sistem peringatan dini multi ancaman bencana tetapi dalam 5-4 tahun ini lebih fokus di masalah tsunami. Jadi untuk peringatan dini tsunami.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah mulai dari siklus atau kalau dalam peringatan dini ini ada 4 kuadran yang dikerjakan. Kuadran pertama adalah mulai dari bagaimana kita memetakan risiko tsunami dari semua daerah yang rawan tsunami di Indonesia akan dipetakan semuanya. Kemudian setelah itu BMKG akan memberikan alat-alat pengamatan, monitoring untuk gempa bumi dan tsunaminya di tempat-tempat itu. Kemudian memastikan bagaimana informasi dari BMKG itu bisa diterima baik langsung oleh pemerintah daerah melalui Pusdalop dan masyarakat. Kemudian kuadran yang keempat adalah memastikan masyarakat tahu apa yang dilakukan. Ini adalah program-program yang terkait dengan penguatan masyarakat seperti desa tangguh bencana tsunami, keluarga tangguh bencana dan sebagainya. Dan termasuk di dalamnya adalah simulasi atau latihan kesiapsiagaan terkait dengan tsunami.

Ini daerahnya mulai dari Aceh ke Pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa sampai ke arah timur. Ini harapannya akan diselesaikan sampai dengan tahun 2024. Demikian Bapak sekilas mengenai program IDRIP. Terima kasih.

**KEPALA BNPB (LETJEN DONI MONARDO):**

Kami laporkan Bapak Pimpinan selama ini kegiatan latihan kebencanaan itu hanya pejabatnya saja yang latihan. Nelum pernah menyentuh sampai ke tingkat keluarga. Makanya dana ini nanti akan kami

optimalkan untuk melibatkan seluruh keluarga agar bisa terima latihan. Kami sudah sampaikan kepada pihak yang mengusulkan kalau anggaran ini digunakan untuk belanja barang terutama teknologi saya bilang “Saya gak mau terima saya keberatan kepada tim Bappenas juga saya sampaikan begitu” Kenapa? Teknologi setiap saat itu pasti akan ada perubahan. Tetapi kalau manusia anak-anak kita ajarkan sekarang sekian puluh tahun yang akan datang mereka masih akan ingat dan semakin cerdas makin pintar.

Kita tidak ingin terulang kembali seperti tsunami Aceh. Kenapa begitu banyak korban? Karena pelajaran atau pengalaman masa lalu yang terjadi di beberapa tempat di Aceh seperti Pulau Simeulue yaitu Smog itu semua itu tidak tersalurkan kepada daerah lain. Padahal Bapak Pimpinan sebagaimana data yang kalian peroleh tsunami Aceh itu telah terjadi berkali-kali. Jadi bukan hanya sekali pada tanggal 26 Desember 2004 sudah pernah terjadi selama periode 7400 tahun, 5400 tahun, 3200 tahun 2900 tahun. Jadi inti artinya apa? Gempa dan tsunami ini adalah peristiwa yang berulang.

Demikian juga seperti di Palu bukan yang pertama sudah pernah terjadi pada tahun 1927 dan 1968. Jadi kalau kita ingin tahu tentang kejadian yang terjadi di wilayah nasional kita, data paling lengkap itu ternyata bukan di Indonesia Bapak. Ada di Arsip Nasional Belanda dan di sejumlah perguruan tinggi Belanda. Inilah yang kami inginkan sehingga setiap daerah nanti memiliki pengetahuan yang berbeda seperti halnya di daerah Bandung, Lembang masyarakat di sana harus diberikan pengetahuan tentang resiko patahan Lembang. Karena patahan Lembang ini pernah terjadi setiap 100 tahun yang lalu dan korbannya juga sangat besar. Demikian juga di sepanjang pantai pulau Jawa yang kalau kita lihat Kenapa Belanda tidak membangun kawasan Selatan Jawa? Dan sangat mungkin salah satu faktornya adalah masalah alam. Oleh karenanya masyarakat yang berada di wilayah sepanjang pantai Pulau Jawa harus mendapatkan pelatihan tentang bencana untuk menghadapi tsunami.

Jadi ini yang sekarang kami optimalkan dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah gambaran yang lebih utuh kepada bangsa kita tentang risiko yang dihadapi di tiap-tiap daerah dan bagaimana mereka mempersiapkannya lebih baik sehingga walaupun terjadi ke depan maka korban jiwanya harus serendah-rendahnya. Kira-kira demikian Bapak Pimpinan yang dapat kami laporkan mohon maaf apabila masih ada yang belum terjawab.

*Wabilahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Letnan Jenderal Doni Monardo Kepala BNPB yang sudah menjawab jawab beberapa pertanyaan termasuk masukan dan saran dari anggota baik dari fisik maupun virtual termasuk di meja pimpinan.

## **Bapak Ibu anggota yang terhormat.**

Tibalah saatnya kita akan membacakan draf kesimpulan. Mohon ditampilkan. Saya akan baca kata per kata mohon dicermati khususnya Kepala BNPB dan Bapak Ibu yang berbahagia kalau ada perbaikan nanti silakan setelah saya baca.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan kepala Badan Nasional penanggulangan bencana masa persidangan 1 tahun sidang 2020/2021 Kamis 3 September 2020. Pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI di bersama Kepala Badan Nasional Bencana BNPB dengan agenda membahas pembahasan rencana kerja dan anggaran rementerian lembaga atau RKA K/L Tahun Anggaran 2021 serta isu-isu aktual dan solusinya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 itu sebesar Rp. 813.103.749.000 atau naik sebesar Rp. 97.672.635.000 dibanding Pagu Indikatif BNPB Tahun 2021 sebesar Rp.715.431.114.000. Pagu anggaran BNPB tahun 2021 terdiri dari:
  1. Program ketahanan bencana sebesar Rp.562.712.672.000 yang dari ABC tidak saya bacakan rinciannya.
  2. Program dukungan manajemen sebesar Rp.250.391.077.000 ada 3 juga rinciannya abc tidak mau saya bacakan totalnya seperti yang saya sebutkan tadi Rp.813.103. 3.749.000.

Selanjutnya Komisi VIII 8 DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 dengan para pejabat eselon BNPB yaitu melalui RDP-RDP.

2. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk meningkatkan serapan anggaran BNPB tahun 2020 karena masih rendah ya ini per tanggal 1 September 2020 sebesar Rp.4.075.222.430.495 atau baru sekitar 50,62% dari Pagu Anggaran BNPB tahun 2020 sebesar Rp.8.050.209.984.000 termasuk Pak Armen kalau perlu diatur Untuk program-program Dapil Pak yang bisa kita sinergikan.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak BNPB untuk membahas secara rinci penggunaan dana siap pakai agar lebih transparan dan realisasinya.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Memperkuat mitigasi dan pencegahan sebaran Covid-19 karena rasio antara jumlah orang yang dites dengan total jumlah test Covid-19 di Indonesia saat ini lebih tinggi dibanding positif rate di dunia.

- b. Memastikan vaksin yang akan digunakan manusia benar-benar aman termasuk vaksin Sinovac yang berasal dari Cina termasuk masalah halalnya Pak dan ini sudah ada sama dengan MUI.
- c. Meningkatkan produksi Alat perlindungan diri APD yang sesuai standar bagi para tenaga medis di Puskesmas-Puskesmas khususnya karena mereka berada di garda terdepan dalam melawan Covid-19. Jangan seperti kata Pak Husni tadi cuci pakai dipakai Pak tapi kan disetrika ya Pak ya?
- d. Mewaspadaai terjadinya perubahan Covid-19 yang bermutasi menjadi lebih menular dan berbahaya.
- e. Meyakinkan semua pihak bahwa gelaran Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 benar-benar dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ini Pak Doni sebagai Satgas Covid untuk perlu membuat gebrakan yang terasa harus dipatuhi oleh yang Pilkada sebanyak 270 daerah.
- f. Memperluas sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan masker dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19. Sekarang ini bukan hanya ini ya hanya masker tapi jaga jarak kemudian cuci tangan seperti yang standar protokol kesehatan.
- g. Memperkuat evaluasi dan untuk menilai apakah ketahanan bencana yang dilakukan selama ini sudah efektif karena kurva sebaran Covid-19 masih terus meningkat dan belum diketahui kapan akan berakhir yang terakhir.
- h. Menganggarkan alat pencegahan pencemaran seperti alat uji Covid-19 (rapid test, swab, masker dan disinfektan dan sebagainya) ke lembaga pendidikan terutama pesantren.
- i. Menetapkan standar dan prosedur uji Covid-19 (Rapid test, PCR/Swab test) agar masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai tata cara dan biayanya.
- j. Mengklarifikasi dihapusnya penyebutan nama BNPB dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ini akan segera kami bahas, surpresnya sudah kami terima. Panjangnya sedang kami bentuk ini.

Saya kira Pak Erman ... yang melibatkan stakeholder yang lain. Saya kira itu Pak Doni Bapak Ibu sekalian yang saya bacakan silakan. Pak Doni kalau ada yang perlu ditambahkan dikurangi atau direvisi silakan Pak.

**KEPALA BNPB (LETJEN DONI MONARDO):**

Terima kasih Pak Pimpinan kami rasa sudah lengkap semua kecuali yang tadi Pak Pimpinan sampaikan tentang 3 m tadi selain masker cuci tangan jaga jarak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan dari Anggota Pak Ali?

**F- PARTAI GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):**

Pak Ketua sedikit saja poin h dalam kurung rapid test dan PCR test untuk lembaga-lembaga pendidikan. Untuk PCR itu tidak mungkin seperti halnya kalau di lembaga pendidikan tapi cukup rapid tes, masker, hand sanitizer dan sebagainya. Nggak mungkin karena harus bukan hanya alat mahal tetapi harus ada tempat yang sangat memungkinkan. Mungkin sedikit koreksi saja.

**KETUA RAPAT:**

Eenggak apa-apa Pak ini keberpihakan kita kalau test juga bisa ditukan. Sesuai pelaksanaan nanti sesuai kondisi. Karena Swab di sini cairan hidung sama ininya diambil dibawa ke rumah sakit terdekat. Dengan Madurakan ada jembatan Madura tercepat ke Surabaya. Tapi kalau masih pakai perahu ketek susah. Oke ya. Ada anggota lain? Silakan Pak Husni.

**F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):**

Poin 4 b memastikan vaksin Sinovac yang akan digunakan di Indonesia benar-benar aman termasuk vaksin obat yang berasal dari Cina. Saya ingin menambahkan bahwa yang digunakan ini satu benar-benar aman dan halal tambah kata-kata halal itu saja. Terima kasih.

**F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Pimpinan saya bilang halalnya itu ditambah. Begini Pak Ketua jadi perdebatan di publik soal vaksin ini. Jangan sampai terkesan di bahwa vaksin ini menjadi alat bisnis lah. Jadi oleh karena itu menurut saya kalau saya Ketua mengusulkan untuk ketahanan bangsa ini bikin ... Makanya. Sebab misalnya kita berita sekarang ini harga vaksin Corona tergantung penjual tidak diatur Pemerintah ini pernyataannya Pak Erick ini barusan nggak kalau kayak gini waduh.

**KETUA RAPAT:**

Nanti tolong diagendakan rapat gabungan bersama ya para pihak untuk kita menyatukan pandangan ya. Tapi intinya Pak Doni memang negara harus hadir Pak kalau vaksin. Kita dengan adanya Perpu Nomor 1 saya kira sudah cukup pemerintah apa-apa lagi ada revisi undang-undang tentang keuangan negara. Cukup?

**F- PKS (K.H. BUKHORI, L.C., M.A):**

Bukan mengklarifikasi dihapus jadi mempertanyakan ketidakikutsertaan BNPB dalam membahas dalam membahas RUU sesuai dengan Surpres.

**F- PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, B.A., B.Comm., M.E.Con):**

Kemarin itu bukan mempertanyakan dihapusnya penyebutan nama Kalau Pak Doni ikut juga.

**KETUA RAPAT:**

Iya karena BNPB nggak ada di Supres. Ya tidak disebutkan. Itu makanya mau kira klarifikasi antarpemerintah kenapa ini turunnya begitu? Yang kita terima penyebutan nama BNPB itu kan tidak ada. Silakan Pak .. cukup ya? Silakan Pak Achmad.

**F- PARTAI DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Saya izin Ketua, menyampaikan berita duka baru 5 menit yang lalu mertua saya meninggal. Jadi saya izin.

**KETUA RAPAT:**

Turut berduka Pak, insyaallah khusnul khotimah. Masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

**F- PARTAI DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Amin.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Achmad salam untuk keluarga.

**F- PKS (K.H. BUKHORI, L.C., M.A):**

Kami juga turut berduka cita ya Pak Achmad dan keluarga tabah melepasnya.

**KETUA RAPAT:**

Salam untuk keluarga Pak. Saya kira cukup Pak Doni.

**Bapak Ibu Anggota.**

Apa yang saya baca tadi tidak percaya banyak kan lagi terhadap perbaikan sudah disesuaikan dengan poin per poin kalimat per kalimat. Maka aaya tawarkan apakah dalam yang saya bacakan tadi dengan sudah mengalami beberapa perbaikan bisa kita ambil sebuah kesimpulan dalam rapat kerja ini setuju?

**(RAPAT: DISETUJUI)**

Baik Pak silakan kata terakhir Pak sebelum Raker ini saya tutup.



**KEPALA BNPB (LETJEN DONI MONARDO):**

**Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi VIII yang kami banggakan.**

Kami segenap keluarga besar BNPB dan juga Satgas Penanganan Covid-19 menghaturkan erima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian seluruh anggota Komisi VIII DPR RI sejak mulai awal kasus terjadi sudah beberapa kali berkunjung ke BNPB selalu memberikan semangat kepada tim yang bertugas dan mudah-mudahan semangat yang telah diberikan oleh seluruh anggota Komisi VIII ini semakin meningkatkan jiwa pengabdian dari seluruh anggota BNPB dan segenap unsur yang mendukung BNPB dalam Satgas Penanganan Covid-19. Dan kita berdoa semoga kita sebagai bangsa dapat mengatasi Covid ini menjadi lebih baik lagi kita menekan angka kematian menjadi lebih rendah lagi termasuk kita juga mampu melindungi seluruh tenaga kesehatan terutama dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya.

**KETUA RAPAT:**

Demikian terima kasih Pak Kepala BNPB Pak Letnan Jenderal Doni Monardo Pak Sestama beserta seluruh jajaran. Terima kasih para anggota para pimpinan baik yang fisik maupun virtual. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung rapat kerja dengan BNPB pada hari ini salah semua sudah bisa kita sama-sama kawal untuk bangsa dan negara yang sangat kita cintai ini dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil alamin*. Saya nyatakan rapat hari ini ditutup. Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13:56)**

**Jakarta, 03 September 2020**

**a.n. KETUA RAPAT**

**SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 197309261997031001**